



MACOA

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol 1 No. 2 Tahun 2024

<https://journal.itbmpolman.ac.id/index.php/jurnalmacoa>

Program Penyuluhan Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar

M. Yasin¹, Muhammad Alwi²

¹Agribisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Teknologi Muhammadiyah

²Kewirausahaan Institut Teknologi dan Bisnis Teknologi Muhammadiyah

yasin.agr21@itbpolman.ac.id*, muhammadalwi@itbpolman.ac.id

Abstrak

Pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan menjadi tantangan utama di pedesaan akibat kurangnya pengetahuan dan praktik ramah lingkungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di Desa Kuajang dalam mengelola perkebunan secara berkelanjutan melalui pendekatan penyuluhan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi survei kebutuhan masyarakat, pelatihan terpadu, serta pendampingan langsung dalam implementasi praktik perkebunan berkelanjutan, seperti pengelolaan tanah, penggunaan pupuk organik, dan diversifikasi tanaman. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat terkait teknik pertanian berkelanjutan, yang tercermin dari adopsi metode ramah lingkungan oleh sebagian besar peserta. Dampaknya meliputi peningkatan produktivitas kebun dan kelestarian lingkungan desa. Kesimpulan menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis kebutuhan lokal efektif dalam mendorong perubahan positif pada praktik pertanian masyarakat pedesaan. Program ini merekomendasikan pengembangan model serupa di desa lain untuk memperluas dampak keberlanjutan.

Kata kunci: perkebunan, penyuluhan, masyarakat, pertanian ramah lingkungan.

Korespondensi Email : yasin.agr21@itbpolman.ac.id

Digital Object Identifier : -

Diterima Redaksi : 12-05-2024 | **Selesai Revisi** : 25-05-2024 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2024

1. Pendahuluan

Pertanian adalah sektor vital dalam perekonomian Indonesia, dengan peran strategis dalam pembangunan nasional (Rizal dan Togimin, 2023). Sebagai negara agraris, Indonesia perlu fokus pada pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi besar, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penyediaan pangan dan devisa melalui ekspor (Angga Dwi Permadi, et al., 2023). Namun, kemajuan sektor ini terhambat oleh terbatasnya sarana dan prasarana, serta masalah akses terhadap pupuk. Meskipun pupuk sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi, petani masih bergantung pada pupuk bersubsidi yang sulit diakses (Sihombing, 2023). Pemerintah memberikan subsidi untuk mengurangi beban petani dalam proses produksi.

Perkebunan merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia Evizal (2021). Namun, pengelolaan perkebunan yang tidak terencana dan kurang ramah lingkungan sering kali menyebabkan penurunan kualitas tanah, menurunnya produktivitas hasil kebun, dan kerusakan ekosistem secara berkelanjutan. Desa Kuajang adalah salah satu desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor perkebunan, namun menghadapi tantangan serupa, seperti minimnya pengetahuan tentang praktik perkebunan berkelanjutan dan ketergantungan pada bahan kimia pertanian.

Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang strategis melalui pendekatan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menerapkan praktik perkebunan yang berkelanjutan. Penyuluhan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Program ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses belajar dan implementasi. Harapannya, program ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan lokal sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pendekatan pengabdian yang dilakukan di Desa Kuajang ini bertujuan untuk (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan. (2) Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis terkait praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. (3) Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis praktik lokal untuk diaplikasikan di desa lain. Sehingga pengabdian ini akan membahas langkah-langkah implementasi program serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat dan lingkungan Desa Kuajang.

1.1 Pengertian Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian merupakan sarana kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong pembangunan pertanian dilain pihak, petani mempunyai kebebasan untuk menerima dan menolak saran yang diberikan agen penyuluhan pertanian maka penyuluhan hanya dapat mencapai sasarannya jika perubahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan petani (Latif, A., et al. 2022).

Penyuluhan pertanian melibatkan penyampaian informasi, teknologi, dan inovasi terkait budidaya, pengelolaan lahan, pascapanen, pemasaran, serta aspek lainnya dalam sistem agribisnis. Hal ini biasanya dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian melalui berbagai metode, seperti pelatihan, pemaparan lapangan, diskusi kelompok, dan pendampingan individu. Penyuluhan akan dikatakan berhasil, apabila telah terjadi perubahan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari sasaran sehingga akan tercipta kesejahteraan bagi sasaran penyuluhan tersebut. Untuk mendukung terciptanya kegiatan penyuluhan yang berhasil maka perlu dilakukan persiapan sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan.

1.2 Peran Penyuluh Pertanian

Peranan penyuluh pertanian terbilang sangat vital karena penyuluh merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan petani guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta peningkatan komoditas pertanian. Dikarenakan fungsinya yang strategis penyuluh memiliki tugas pokok dan fungsi yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan penyuluhan

Jabatan tugas pokok dan fungsi tercantum dalam peraturan Menteri. Hal ini Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008. Sesuai dengan paradigma baru penyuluhan, yang bergeser dari pola *top down* menjadi *bottom up* dimana bentuk hubungan antara penyuluh dan petani tidak lagi sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai mitra sejajar petani, maka tugas pokok dan fungsi penyuluh tersebut juga mengalami perubahan ke arah perannya sebagai mitra sejajar petani. Kondisi ini menuntut penyuluh untuk selalu mengembangkan diri agar dapat memberikan layanan yang memuaskan petani.

1.3 Pengembangan Masyarakat Kelompok Tani

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah program menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) bersifat *bottom up* dan lokalitas. Munculnya pola pembangunan *alternative* ini di dasari pada tujuan untuk mengembnglam, merekonstruksi struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang menekankan prinsip keadilan maupun program implementatif yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan yang dipakai pada model pembangunan ini adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, serta menenpatkan dan menyertakan orang-orang local (Gugule,H.,2022).

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa Kuajang secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Metode pelaksanaan mencakup beberapa langkah berikut:

2.1 Analisis Kebutuhan dan Observasi Lapangan

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di Desa Kuajang melalui survei, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD). Data yang dikumpulkan meliputi kondisi perkebunan, tingkat pengetahuan masyarakat tentang praktik berkelanjutan, dan kendala yang dihadapi.

Data dan informasi yang dihimpun mencakup berbagai aspek, antara lain kondisi terkini perkebunan sektor, tingkat pemahaman tentang praktik masyarakat praktik-praktik pertanian berkelanjutan, serta beragam tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam aktivitas keseharian masyarakat. Selain itu, dilakukan pemetaan potensi sumber daya lokal yang dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan desa secara holistik dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus merumuskan strategi yang relevan dan berbasis data guna saya

2.2 Penyusunan Program Pelatihan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, materi penyuluhan disusun secara kontekstual. Materi mencakup topik-topik seperti :

1. Pengelolaan tanah secara organik.
2. Penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
3. Diversifikasi tanaman untuk meningkatkan produktivitas.
4. Teknik konservasi air untuk lahan perkebunan.
5. Pelatihan dan Penyuluhan. Sedangkan kegiatan pelatihan dilakukan secara bertahap, meliputi Sesi Teori ini di sampaikan melalui seminar, ceramah, dan diskusi interaktif untuk memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan praktik lapangan atau demonstrasi secara langsung di lahan perkebunan, di mana peserta dilatih untuk menerapkan teknik-teknik yang telah dipelajari.

2.3 Pendampingan dan Monitoring

Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan intensif kepada peserta untuk memastikan implementasi praktik berkelanjutan. Kegiatan ini melibatkan kunjungan lapangan secara berkala untuk memberikan bimbingan teknis dan memantau perkembangan hasil yang dicapai.

2.4 Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan program, baik dari segi pemahaman peserta maupun dampak terhadap praktik perkebunan. Data evaluasi dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi diberikan untuk pengembangan program serupa di masa mendatang.

2.5 Waktu dan Lokasi

Program ini dilaksanakan di 2 Desa, yaitu Desa Kuajang dan Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja mengingat lokasi tersebut beberapa kelompok tani yang sangat aktif di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 40 hari dimulai pada tanggal 30 Maret hingga 10 Mei 2024.

2.6 Partisipan

Peserta program terdiri dari petani lokal yang dipilih berdasarkan tingkat ketergantungan pada sektor perkebunan dan kesediaan untuk berpartisipasi aktif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Setelah mengikuti pelatihan, tingkat pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan ditemukan bahwa dari ketiga lokasi desa lokasi pengabdian peserta telah memahami konsep dasar pengelolaan tanah secara organik dan diversifikasi tanaman. Berbanding terbalik pada saat sebelum program pengabdian ini dilaksanakan sebagian peserta belum memiliki pengetahuan dasar ini. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas metode penyuluhan berbasis partisipasi, sebagaimana dijelaskan oleh (Sabardila 2020) yang menyebutkan bahwa pendekatan ini mampu membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat secara lebih mendalam.



Gambar 1. Penyuluhan Pertanian berkelanjutan Desa Kuajang.



Gambar 2. Penyuluhan dan pendampingan pertanian berkelanjutan Desa Rea.

3.2. Adopsi Teknik Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan adalah pendekatan holistik terhadap pertanian yang berusaha menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari produksi pertanian. Pendekatan ini mencakup berbagai praktik, termasuk pertanian organik, wanatani, dan pertanian presisi, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan mata pencaharian petani (Arifin, Z., 2023)

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengadopsi minimal satu teknik yang diajarkan, seperti penggunaan pupuk organik dan penggunaan pestisida secara tidak berlebihan. Selain itu, beberapa petani juga mulai mencoba diversifikasi tanaman dengan menanam tanaman pendukung, seperti Cabai, yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah.

Penerapan diversifikasi tanaman berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat pada satu jenis komoditas, sehingga mengurangi risiko kerugian akibat penurunan harga atau kegagalan panen. Di beberapa lahan, petani juga mulai mengintegrasikan sistem agroforestri, seperti menanam pohon pelindung atau tanaman keras bersama dengan tanaman pangan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap erosi tanah, tetapi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon.

3.3. Rekomendasi untuk Pengembangan

Berdasarkan hasil dan tantangan yang ditemukan, beberapa rekomendasi dapat diberikan: Penguatan akses ke sumber daya ini dapat dilakukan dengan membangun kerja sama dengan pemerintah lokal untuk menyediakan pupuk organik berkualitas dengan harga terjangkau (Patunah & Pradani 2024). Selanjutnya, kontribusi pendidikan berkelanjutan seperti pengadaan program lanjutan untuk memperdalam penerapan teknik baru dan memberikan pelatihan kepada generasi muda sebagai agen perubahan (Minardi, 2023). Hingga kolaborasi dengan pihak eksternal dengan melibatkan lembaga penelitian atau universitas untuk mendukung pengembangan metode dan teknologi berkelanjutan (Nagdev 2024).

4. Kesimpulan

Program penyuluhan perkebunan berkelanjutan di Desa Kuajang telah berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan secara ramah lingkungan. Adopsi teknik seperti penggunaan pupuk organik, diversifikasi tanaman, dan konservasi udara menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis partisipasi efektif dalam mendorong perubahan perilaku petani. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada peningkatan hasil perkebunan, namun juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, beberapa tantangan masih menghadang, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya pendukung dan perlunya pendampingan jangka panjang untuk memastikan keinginan praktik yang telah diajarkan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan, menjadi langkah strategi untuk memperkuat dampak program ini.

5. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan jurnal ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berharga.

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua Orang tua dan keluarga yang telah meberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Muhammad Alwi, S. Pd., M.M. Selaku dosen pembimbing lapangan.
3. Para narasumber dan responden yang telah membatu memberikan informasi ilmu yang bermanfaat.
4. Serta seluruh pihak yang turut membantu .

6. Daftar Rujukan

- [1] Angga Dwi Permadi, Durratul Hikmah Fatus Solikhah, and Muhammad Yasin. 2023. “Strategi Industrialisasi Hubungan Dengan Sektor Pertanian Di Wilayah Sidoarjo.” *Student Research Journal* 1(3): 54–63.
- [2] Arifin, Z., Suparwata, D. O., Rijal, S., & Ramlan, W. (2023). Revitalisasi ekonomi pedesaan melalui pertanian berkelanjutan dan agroekologi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(09), 761-769.
- [3] Evizar, R., & Prasmatiwi F, E 2021. Pilar dan model pertanian berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Galung Tropika*. 10(1):129-137.
- [4] Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Peran Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Ppm) Dalam Inovasi Tanaman Coklat Pada Kelompok Tani Di Desa Mopusi Kabupaten Bolaang Mongondow. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(4).
- [5] Latif, A., Iisan, M., & Rosada, I. (2022). Hubungan peran penyuluh pertanian terhadap produktivitas petani padi. *Wiratani: jurnal ilmiah Agribisnis*, 5(1), 11-21.
- [6] Minardi, S., Sudadi, S., Haniati, I. L., Pramono, S., & Suryono, S. (2023). Formulation and Application of Organic Fertilizer from Cow Dung to Increase Rice Yield by Applying Sustainable Agriculture Principles in Gantiwarno, Klaten. *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services*, 6(2), 99-104.
- [7] Nagdev, R., Khan, SA, & Dhupper, R. (2024). Penilaian Sifat Fisiko-Kimia Bubur Biogas sebagai Pupuk Organik untuk Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Biologi Eksperimental dan Ilmu Pertanian* , 12 (4), 634–644.
- [8] Patunah, S., & Pradani, ZE (2024). Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung SDGs Melalui Inovasi Pupuk Organik dari Limbah Ternak. *Jurnal Agribisnis dan Pemberdayaan Masyarakat (JACE)* , 7 (2), 110–117.
- [9] Rizal, and Togimin. 2023. “Pendampingan Penyusunan E-RDCK Menggunakan Teknologi Google Form Pada Gapoktan ‘Rejo Mulyo’ Desa Rejoagung, Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.” *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia* 2(3): 16–29.
- [10] Sabardila, A., Setiawaty, R., & Markhamah, M. 2020. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bugel Kecamatan Pulokato Melalui Program Sosialisasi. *Jurnal Pengabdian*. 4(2):235-246.
- [11] Sihombing, Yennita. 2023. “Inovasi Kelembagaan Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan.” *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences* 5: 83–90.

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Rakorcab ABPEDNAS

Mardin¹, Muhammad Alwi²

¹Agribisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

²Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

mardin.agr21@itbmpolman.ac.id, muhammadalwi@itbmpolman.ac.id

Abstract

With the ABPEDNAS Rakorcab Socialization and BPD Member Capacity Building Training, in order to better understand their roles and functions so that they are able to carry out their duties more effectively. In addition, strengthening communication networks and cooperation between BPD members is also an important strategy. With the support and collaboration between all BPD members in West Sulawesi, with the presence of the ABPEDNAS organization, at least the BPD will be more solid and able to overcome various challenges faced by the BPD itself. Where efforts to build good relationships between members can also increase motivation and work enthusiasm in carrying out their duties and functions. However, often the capacity of BPD members is not optimal in carrying out their roles. This can be caused by various factors and problems, such as lack of knowledge and skills in decision making, administrative management, and understanding of applicable regulations, as well as the still reduced BPD Incentives in Polewali Mandar Regency. The purpose of this service is to increase the capacity of BPD members in terms of the knowledge and skills needed to carry out their duties and functions. The method used in this service is through Training and Socialization. As well as, Coordination Meetings between Village Consultative Bodies.

Keywords: Socialization and Coordination Meeting of BPD Members

Abstrak

Dengan adanya Sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, agar dapat lebih memahami peran dan fungsinya sehingga mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Selain itu, memperkuat jaringan komunikasi dan kerjasama antar anggota BPD juga menjadi strategi penting. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi di antara semua anggota BPD yang ada di Sulawesi Barat, dengan hadirnya organisasi ABPEDNAS setidaknya BPD akan menjadi lebih solid dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPD itu sendiri. Dimana Upaya untuk membangun hubungan yang baik antar anggota juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Namun, seringkali kapasitas anggota BPD belum optimal dalam menjalankan perannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan masalah, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi, dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku, Serta masih berkurangnya Insentif BPD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui Pelatihan dan Sosialisasi. Serta, Rapat Koordinasi antar Badan Permusyawaratan Desa.

Kata kunci: Sosialisasi dan Rakorcab Anggota BPD

Korespondensi Email : mardin.agr21@itbmpolman.ac.id

Digital Object Identifier : -

Diterima Redaksi : 12-05-2024 | **Selesai Revisi** : 25-05-2024 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2024



1. Pendahuluan

Desa adalah kumpulan masyarakat yang diakui secara hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan merupakan penduduk suatu kabupaten. Desa berhak mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa ini mempunyai kepala desa yang membidangi pembangunan, kepentingan masyarakat setempat, dan urusan pemerintahan. Kepala desa dalam mengurus urusan desa dibantu dengan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (FA Ruyiyati, 2023). Desa merupakan wilayah terkecil di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom sejak zaman periode kolonialisasi, karena sejak dahulu desa telah memiliki system dan mekanisme pemerintahan masing-masing.

ABPEDNAS atau Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, yang mana kegiatan Asosiasi ini merupakan sebuah Lembaga atau wadah aspirasi dan alat komunikasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan antar anggota BPD Lainnya untuk memudahkan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam menjalankan Sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan, penetapan peraturan desa, pengawasan kepada pemerintahan desa serta menampung aspirasi masyarakat sehingga menjadi wujud demokrasi di tingkat desa. Peningkatan kapasitas anggota BPD sangatlah penting untuk dilaksanakan sehingga menjadikan sebuah organisasi BPD agar lebih efektif dan Maju, Dimana BPD Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan, Dengan adanya Sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, agar dapat lebih memahami peran dan fungsinya sehingga mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Selain itu, memperkuat jaringan komunikasi dan kerjasama antar anggota BPD juga menjadi strategi penting. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi di antara semua anggota BPD yang ada diDisulawesi Barat, dengan hadirnya organisasi ABPEDNAS setidaknya BPD akan menjadi lebih solid dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPD itu sendiri. Dimana Upaya untuk membangun hubungan yang baik antar anggota juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Namun, seringkali kapasitas anggota BPD belum optimal dalam menjalankan perannya . Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi, dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui pelatihan dan Sosialisasi. Serta, Rapat Koordinasi antar Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Sebuah wadah organisasi yang memegang peran penting didalam pemerintahan desa (Hardinata, R. F. (2024). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan, penetapan peraturan desa, pengawasan kepada pemerintahan desa dan menampung aspirasi masyarakat sehingga menjadi wujud demokrasi di tingkat desa. (Auliya, A., 2024). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa, memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan Peraturan BPD Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kuswandi, A., 2023). Keberadaan BPD merefleksikan bahwa masyarakat desa bukan hanya sekedar subjek pembangunan tetapi sekaligus objek pembangunan. Secara lembaga, kedudukan BPD saat ini telah berubah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa (Hasibuan, M. R 2022). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan (Zitri, I., 2022). Pembangunan desa merupakan sebuah konsep perencanaan kegiatan yang diawali dari tingkat yang paling bawah dengan tujuan mampu menyerap aspirasi masyarakat (Dwinarko, D., 2021). Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus dari negara dan birokrasi mengingat peran penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan otonomi desa sebagai bagian dari otonomi daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya (Malana, ..I 2024).

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Sosialisasi Rakorcab ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran BPD dalam Penyelenggaraan peraturan UU nomor 3 tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa, Kecamatan Polewali Mandar. Dimana BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan Rakorcab ABPEDNAS. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan karena berada di garis depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga jika pembangunan di setiap desa berjalan dengan baik, maka pembangunan yang merata dapat segera tercapai. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa, tujuan pengaturan desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang saling terkait, sehingga perlu diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri dari tahap perencanaan hingga pengawasan dengan melibatkan stakeholders desa, seperti BPD dan organisasi masyarakat.

2. Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan Sosialisai dan Rakorcab dibeberapa anggota BPD, dan membuka diskusi serta tanya jawab untuk mendapatkan informasi juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para Anggota BPD, dalam forum tersebut untuk mendapatkan masukan dari para anggota BPD berkaitan peningkatan kapasitas anggota BPD dalam perumusan kebijakan pembangunan yang ada di Desa yang mampu mendukung Kinerja BPD, yang dilaksanakan di Dua gelombang, Gelombang Pertama dilaksanakan di SMK YPP Wonomulyo yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024 dan Gelombang kedua dilaksanakan di Hotel SUCI Wonomulyo pada tanggal 17 November 2024.

2.1. Hasil dan Pembahasan

Dalam momentum Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS Badan Permusyawaratan Desa BPD, tentu melakukan mulai dari Perencanaan kegiatan, persiapan untuk mengetahui berapa desa yang siap ikut dalam kegiatan tersebut, perlengkapan apa saja yang disiapkan dalam kegiatan tersebut, sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik, yang dirangkaikan dengan sosialisai Rakorcab agar menjadi ajang silaturahmi dan menjadi ruang bagi seluruh anggota BPD untuk meningkatkan kapasitasnya dan memberikan penguatan terhadap undang-undang desa yang baru, terkait dengan tugas dan fungsi anggota BPD, melalui kegiatan tersebut lahir beberapa rekomendasi, yang berkaitan perbaikan dan kemajuan desa di Kabupaten Polewali Mandar. dimana Peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah hal yang paling penting dalam memperkuat kemampuan dalam penyesuaian individu dan organisasi, sehingga mendapat perubahan dilingkungan yang ada. Peningkatan kapasitas anggota BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu Rakorcab ABPEDNAS, baiknya Pelatihan dan evaluasi rutin ini dilaksanakan di setiap tahunnya dan bekerja sama dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Yang diselenggarakan untuk mendidik anggota BPD tentang berbagai aspek peran dan tanggung jawab mereka. Oleh sebab itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Olehnya itu, perlu adanya peningkatan kapasitas anggota BPD agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan yang harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan BPD. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa.

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa yang merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan (Rarumangkay, N. P. (2024). Anggota BPD., Dimana Istilah BPD diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undan tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Sebagai unsur Pemerintah desa BPD mempunyai kewenangan untuk ikut mengatur dan mengurus desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa, memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mencakup pelatihan tentang kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, Yang kedua, silaturahmi ini juga diikuti dengan peningkatan kapasitas BPD, mengingatkan peranannya yang sangat strategis untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan peran yang sangat strategis di lingkup pemerintahan desa, maka anggota BPD harus diiringi dengan penguatan kapasitas yaitu pemaparan terhadap Praktik-Praktik Terbaik. Para anggota BPD dapat mengenal praktik-praktik terbaik dari lembaga-lembaga musyawarah desa yang sukses. Hal ini dapat dilakukan melalui program pertukaran, kunjungan, atau platform online di mana mereka dapat belajar dan berbagi pengalaman. Yang ketiga adalah Program Pendampingan, anggota yang berpengalaman atau pakar eksternal dapat membimbing anggota BPD yang kurang berpengalaman. Yang terakhir adalah Penggunaan Teknologi, memperkenalkan dan melatih anggota BPD mengenai penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak untuk manajemen proyek, komunikasi, dan analisis data. Selain itu, pengembangan kapasitas anggota BPD juga dapat dilakukan melalui pertukaran pengalaman antar-BPD di berbagai desa, dan program pelatihan lainnya.

Peningkatan kapasitas anggota BPD juga dapat melibatkan pemberian akses terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Dengan menerapkan cara-cara ini, diharapkan anggota BPD dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan desa. Pendampingan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD yang kami lakukan telah berjalan dengan lancar dan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota BPD. Pengabdian yang dijelaskan dalam berbagai program pelatihan serta pendampingan dinilai sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan manajemen pemerintahannya. Dimana BPD berperan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan desa termasuk menginisiasi program pembangunan yang mendukung pengembangan SDM di Kabupaten Polewali Mandar. Peran Badan Permusyawaratan Desa adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa, musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemerintah Desa, Pembahasan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berkoordinasi secara kelembagaan dengan pemerintah desa untuk menata potensinya dalam mengembangkan desanya, terutama untuk mendukung pariwisata. Kegiatan ini tidak hanya sekedar memberikan panduan materi, tetapi juga dengan mendampingi langsung perangkat desa dan anggota BPD dengan undang-undang yang berlaku.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan efektivitas BPD dalam menerima, mengelola dan menindaklanjuti aspirasi, ide, serta masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Ini mencakup zserta upaya untuk mewujudkan aspirasi tersebut sesuai dengan prioritas dan ketersediaan sumber daya yang ada. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat juga mencakup responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola aspirasi tersebut demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa (Utuli, F., 2024). Badan Permusyawaratan Desa tidak semata-mata hanya melakukan pengawasan, tetapi juga bertindak menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait aspirasi ini, anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan tetapi juga tulisan. Tulisan yang dimaksud, Badan Permusyawaratan Desa adalah arus menjalankan tata tertib administrasi dalam tata kelola aspirasi masyarakat sehingga mereka dapat merumuskan evaluasi maupun monitoring secara terukur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, anggota BPD di Polewali Mandar tidak hanya memahami tugas dan fungsinya akan tetapi juga melaksanakan strategi dengan baik, sehingga Banyaknya aspirasi serta masukan diberbagai anggota BPD. Yang mana, disemua anggota BPD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar memiliki masalah Utama yaitu tentang Tunjangan dan Insentif BPD yang masih sangat Rendah nilainya dibanding di Kabupaten luar, sehingga BPD merasa memprihatinkan untuk dinaikkan Tunjangannya. BPD juga adalah penampung Aspirasi masyarakat sehingga diakomodasi disetiap tahunnya selama implementasi program APBDes yang menyebabkan adanya penyesuaian kembali berdasarkan aspirasi tersebut. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidak sesuaian dari program APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini untuk memperbaiki ketidak sesuaian itu, BPD hanya menanyakan apakah program dari APBDes

berjalan atau tidak tanpa ada ketegasan dari BPD. BPD tidak memiliki hak untuk memberi sanksi kepada pemerintah Desa karena tidak ada di regulasi. Hal ini membuat BPD tidak bisa berbuat sangat tegas kepada Pemerintah Desa, BPD hanya bisa memberi teguran, saran, kritik dan surat peringatan jika pelaksanaan APBDes tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dalam hasil Musyawarah dan kesepakatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud demokrasi di tingkat pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa, dalam hal ini fungsi BPD sebagai wakil masyarakat dapat membuat rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa, sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan mampu membangun desa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. yang menyebabkan fungsi dan hak BPD tidak optimal dan tinjauan fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa (ABDUL, M. H. D. F. 2023). hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota BPD tentang tugas mereka, masih sedikit banyak masyarakat yang masih awam mengenai BPD. Kurangnya keaktifan dari anggota BPD, serta keterbatasan sumber daya dan inovasi BPD. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD melalui pelatihan dan Sosialisasi Rakorcab, peningkatan partisipasi masyarakat, dan evaluasi berskala kinerja BPD dengan melibatkan pihak ketiga yaitu dinas PMD agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan kesejahteraan Desa.

Pada akhirnya kegiatan Sosialisasi dan Rakorcab ini yang telah dilakukan dan sudah dilaksanakan, tentu sudah mampu memberikan nilai yang positif bagi perkembangan pemerintah Desa, meski belum semaksimal mungkin. Hasil dari kegiatan Sosialisasi dan Rakorcab menunjukkan bahwa strategi peningkatan kapasitas anggota BPD yang efektif termasuk pelatihan dan pendampingan Dibeberapa instansi terkhusus Dinas PMD, pemaparan terhadap praktik-praktik terbaik, untuk meningkatkan keterlibatan anggota. Dengan melakukan pelatihan dan Sosialisasi Rakorcab, sehingga anggota BPD menjadi lebih faham tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan menghindari konflik. Namun, perlu diingat bahwa Peningkatan Kapasitas Anggota BPD ini bukanlah proses yang instan. Ini membutuhkan upaya kerja keras sehingga komitmen dan konsisten dari semua pihak yang terlibat, termasuk anggota BPD itu sendiri, Pemerintah Desa, dan instansi terkait yang menyelenggarakan pelatihan Serta pendampingan. dimana forum ini memiliki peran penting dalam pencegahan tindak korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa. Dan kenaikan insentif Anggota BPD. Dengan demikian, peningkatan kapasitas anggota BPD dan Sosialisasi Rakorcab ini adalah langkah penting yang dapat membantu dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera.

2.2. Gambar



Gambar 1 : Peningkatan kapasitas Anggota BPD



Gambar 1 : Sosialisasi dan Rapat koordinasi cabang ABPEDNAS

3. Simpulan

Dalam momentum Sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS Badan Permusyawaratan Desa BPD dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran BPD dalam Penyelenggaraan peraturan UU nomor 3 tahun 2024 Tentang Pemerintah Desa, Sekecamatan Polewali Mandar, yang dirangkaikan dengan sosialisai Rakorcab yang menjadi ajang silaturahmi dan menjadi ruang bagi seluruh anggota BPD untuk meningkatkan kapasitasnya dan memberikan penguatan terhadap undang-undang desa yang baru, terkait tugas dan fungsi anggota BPD, melalui kegiatan tersebut lahirlah beberapa rekomendasi, dan ide-ide baru yang berkaitan dengan perbaikan dan kemajuan desa di Kabupaten Polewali Mandar.

Dimana Peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah hal yang paling penting dalam memperkuat kemampuan dalam penyesuaian individu dan organisasi, sehingga mendapat perubahan lingkungan yang ada. Peningkatan kapasitas anggota BPD dan Sosialisasi Rakorcab dalam kegiatan ini membuka luas pengetahuan dan keterampilan Anggota BPD. Agar dapat dilakukan dengan cara yaitu Sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, baiknya dilakukan Pelatihan dan evaluasi, agar dilaksanakan disetiap tahunnya dan bekerja sama dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), untuk mendidik anggota BPD tentang berbagai aspek peran Tugas dan Fungsinya tanggung jawab mereka dalam membangun Desa maju dan Sejahtera.

Daftar Rujukan

- [1] Ruiyati, F. A., & Hilman, Y. A. (2023). DINAMIKA JABATAN 20 TAHUN KEPALA DESA. *Jurnal Partisipatoris*, 5(2).
- [2] Hardinata, R. F. (2024). Strategi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Dalam Upaya Menjadikan Organisasi Yang Lebih Efektif. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 55-57.
- [3] Kuswandi, A., Hartono, R. S., & Nuraini, S. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melalui Pendekatan Workshop di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1600-1613.
- [4] Masrunik, E., Wahyudi, A., & Khoirianto, R. (2021). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Keanggotaan BPD dan Anggota BUM Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Tahun 2020. *Science Contribution to Society Journal*, 1(1), 31-35.
- [5] Rarumangkay, N. P. (2024). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SAWANGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA. *LEX CRIMEN*, 12(4).
- [6] Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi, H. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *PERSPEKTIF*, 11(2), 674-691.

- [7] Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2022). Pendampingan penguatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karang Bongkot dalam penyusunan perdes pembentukan Bumdes. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(3), 726-738.
- [8] Auliya, A., & Pamungkas, T. K. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Desa Bagon Kecamatan Puger. *FORMULA Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 15-25.
- [9] ABDUL, M. H. D. F. (2023). TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- [10] Maulana, I., Rohim, A., & Budiono, A. N. (2024). OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM Mendukung Pembangunan Desa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- [11] Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 217-225.

Strategi Hukum dalam Mencegah Pernikahan Dini untuk Menanggulangi Stunting di Desa Rappang Barat

¹Burhanuddin, Muhammad Alwi²

¹Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

²Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

burhan.kwu21@itbmpolman.ac.id*, muhammadalwi@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu dan anak, salah satunya adalah stunting. Stunting, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, memengaruhi perkembangan fisik dan otak anak, serta kualitas hidup mereka. Di Desa Rappang Barat, meskipun ada regulasi mengenai batas usia pernikahan, pernikahan dini masih terjadi. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap stunting dan pentingnya penegakan hukum untuk mencegahnya. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi melalui penyuluhan, diskusi kelompok, pelatihan keterampilan ekonomi keluarga, dan pendampingan hukum mengenai peraturan pernikahan yang berlaku. Kegiatan ini melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi yang benar dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan pernikahan dini. Diharapkan, hasilnya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat, berkurangnya angka pernikahan dini, dan menurunnya prevalensi stunting di desa tersebut.

Kata Kunci: Pernikahan dini, stunting, pengabdian masyarakat, pendekatan hukum, pemberdayaan ekonomi.

Korespondensi Email : burhan.kwu21@itbmpolman.ac.id

Digital Object Identifier : -

Diterima Redaksi : 12-05-2024 | **Selesai Revisi** : 25-05-2024 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2024

1. Pendahuluan

Pernikahan dini telah menjadi isu yang memprihatinkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menciptakan tantangan sosial, tetapi juga berisiko besar terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang terlibat. Secara khusus, dampak yang paling terlihat adalah masalah kesehatan, terutama terkait dengan permasalahan stunting pada anak-anak yang lahir dari pernikahan dini. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif mereka. Stunting ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup anak di masa depan, termasuk kemampuan untuk belajar dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, stunting tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga berpotensi mengurangi produktivitas individu di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Stunting telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian lebih karena dampaknya yang luas terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Banyak anak yang mengalami stunting, selain menderita gangguan pertumbuhan fisik, juga mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif dan kemampuan belajar mereka. Anak-anak dengan kondisi stunting seringkali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, mereka juga lebih rentan terhadap penyakit infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dalam banyak kasus, pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan angka stunting, karena perempuan yang menikah pada usia muda sering kali melahirkan sebelum tubuh mereka sepenuhnya siap untuk menjalani kehamilan yang sehat (World Health Organization, 2020). Oleh karena itu, pernikahan dini dan stunting memiliki hubungan erat yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan.



Pernikahan dini di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang lainnya, dipengaruhi oleh beragam faktor yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dijalani oleh keluarga, terutama bagi perempuan yang dianggap telah mencapai usia untuk menikah. Selain itu, kemiskinan menjadi pendorong utama bagi terjadinya pernikahan dini, di mana keluarga yang hidup dalam kesulitan ekonomi sering kali menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban mereka. Dalam banyak kasus, anak perempuan dianggap sebagai beban yang perlu segera "diselesaikan" dengan menikahkan mereka pada usia muda, sehingga mereka tidak menjadi tanggungan ekonomi keluarga lagi (Rahmawati, 2019). Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan juga berperan penting dalam terjadinya pernikahan dini. Banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini, baik bagi kesehatan reproduksi perempuan maupun perkembangan anak yang dilahirkan. Kurangnya pemahaman ini mengarah pada keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang terlalu muda, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya secara lebih mendalam. (Yulianto, M. 2020).

Selain faktor sosial dan budaya, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini. Di banyak daerah, rendahnya akses pendidikan untuk perempuan menjadikan mereka tidak memiliki pilihan lain selain menikah pada usia muda. Pendidikan dapat menjadi salah satu faktor pencegah yang signifikan terhadap pernikahan dini, karena perempuan yang lebih terdidik lebih cenderung untuk menunda pernikahan dan fokus pada pengembangan karier serta peningkatan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, mengedukasi masyarakat, khususnya orang tua dan generasi muda, mengenai dampak pernikahan dini sangatlah penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan risiko dan konsekuensinya (Silalahi, 2021).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menangani masalah pernikahan dini dengan menetapkan kebijakan yang mengatur usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini, batas usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 19 tahun. Namun, meskipun peraturan tersebut telah ditetapkan, angka pernikahan dini di beberapa daerah di Indonesia masih tetap tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum yang dapat meminimalkan terjadinya pernikahan dini, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaksanaan regulasi yang ada. Penegakan hukum yang lebih ketat, seperti memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan ini, dapat menjadi solusi untuk menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sehat dan sesuai usia (Supriyanto, 2020).

Namun, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan adanya regulasi. Diperlukan pula pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Salah satunya adalah melalui sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai dampak buruk dari pernikahan dini, termasuk hubungan erat antara pernikahan dini dan stunting. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan yang lebih baik untuk perempuan dapat memperkecil angka pernikahan dini dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan berpendidikan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pendekatan hukum dalam mencegah pernikahan dini haruslah dipadukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi masalah ini. Diperlukan kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta aparat penegak hukum. Pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi tentang risiko pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya stunting (Kurniawan, 2020). Dalam hal ini, pendidikan adalah alat yang sangat efektif untuk mengubah pola pikir masyarakat dan mencegah pernikahan dini. Masyarakat yang lebih terdidik tentang dampak pernikahan dini akan lebih cenderung untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka stunting di Indonesia.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan juga sangat penting untuk menurunkan angka pernikahan dini. Memberikan akses terhadap peluang kerja yang lebih baik bagi perempuan akan memberikan kemandirian

ekonomi, sehingga mereka tidak terpaksa menikah dini untuk mengurangi beban ekonomi keluarga (Silalahi & Hidayat, 2021). Hal ini juga akan memperkecil kemungkinan pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor kemiskinan. Selain itu, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan juga dapat membantu mereka untuk meraih kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pernikahan sebagai solusi dari masalah ekonomi.

Strategi untuk mencegah pernikahan dini dan mengurangi dampaknya terhadap stunting di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini harus melibatkan peran aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan perkembangan anak. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak dan implementasi yang konsisten terhadap kebijakan yang ada, diharapkan angka pernikahan dini dan stunting di Indonesia dapat ditekan, serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

2. Metode Pelaksanaan

a. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Desa Rappang Barat mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan, terutama terkait dengan stunting, serta untuk mengedukasi mereka mengenai pentingnya penerapan regulasi hukum yang ada untuk mencegah pernikahan dini. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penundaan pernikahan sampai usia yang matang, guna mencegah risiko kesehatan seperti stunting pada anak-anak yang dilahirkan.

b. Pendekatan dan Metode yang Digunakan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap pelaksanaannya. Beberapa metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah:

c. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Sosialisasi tentang dampak pernikahan dini dan stunting akan dilakukan melalui penyuluhan yang dilaksanakan di balai desa Rappang Barat. Tim pengabdian akan menyampaikan materi tentang:

- Pengertian dan dampak pernikahan dini, baik secara sosial, psikologis, maupun kesehatan.
- Penjelasan tentang regulasi hukum yang ada terkait dengan usia pernikahan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan adalah 19 tahun.
- Pengetahuan mengenai hubungan langsung antara pernikahan dini dan risiko stunting pada anak-anak.

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, menggunakan media audio-visual, seperti slide presentasi dan video edukasi, serta memberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan narasumber.

d. Diskusi Kelompok

Setelah penyuluhan, akan dilaksanakan diskusi kelompok untuk menggali lebih dalam pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini dan stunting. Diskusi ini juga bertujuan untuk mencari solusi bersama

mengenai masalah pernikahan dini yang masih terjadi di Desa Rappang Barat. Dalam sesi diskusi ini, masyarakat akan diajak untuk berbicara tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di desa mereka, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat untuk mencegahnya.

e. **Pelatihan Pemberdayaan Keluarga**

Pemberdayaan keluarga melalui pelatihan keterampilan ekonomi juga menjadi bagian dari kegiatan ini. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi keluarga alternatif sumber pendapatan yang dapat mengurangi faktor kemiskinan, yang sering kali menjadi salah satu pendorong pernikahan dini. Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan keterampilan dalam bidang usaha kecil dan menengah (UKM) serta pemahaman tentang pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik. Diharapkan, dengan adanya peningkatan ekonomi keluarga, kebutuhan untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda dapat dikurangi.

f. **Pendampingan Hukum**

Pendampingan hukum akan diberikan kepada para orang tua dan tokoh masyarakat yang mungkin kurang memahami tentang dampak hukum dari pernikahan dini dan peraturan yang berlaku. Tim pengabdian akan memberikan bimbingan mengenai hak-hak perempuan dan anak di bawah undang-undang, serta prosedur untuk mengakses lembaga hukum jika terjadi pelanggaran terhadap aturan usia pernikahan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum setempat akan diajak untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi yang tepat tentang pelaksanaan hukum terkait pernikahan dini.

g. **Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat:**

Kelompok pemberdayaan masyarakat akan dibentuk dengan tujuan untuk menjadi agen perubahan di tingkat desa. Kelompok ini akan berfungsi untuk menyebarkan informasi terkait bahaya pernikahan dini dan stunting, serta menjadi saluran untuk menyampaikan laporan atau keluhan mengenai kasus-kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Rappang Barat. Kelompok ini akan dilatih untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada masyarakat lainnya dan berfungsi sebagai mitra dalam memerangi pernikahan dini di masa depan.

h. **Sasaran dan Partisipasi Masyarakat**

Kegiatan pengabdian ini akan melibatkan masyarakat secara aktif, dengan sasaran utama:

- Keluarga, terutama orang tua yang memiliki anak perempuan usia remaja.
- Tokoh masyarakat dan pemuda desa yang dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah pernikahan dini.
- Aparat desa dan aparat penegak hukum setempat untuk mendukung penerapan hukum secara lebih efektif di tingkat lokal.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan kegiatan ini. Oleh karena itu, mereka akan dilibatkan langsung dalam berbagai sesi, mulai dari penyuluhan, diskusi kelompok, hingga pelatihan keterampilan ekonomi.

i. **Penutupan dan Tindak Lanjut**

Pada akhir kegiatan, akan diadakan acara penutupan yang melibatkan seluruh peserta untuk mendiskusikan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, tindak lanjut juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang telah diberikan dapat diteruskan oleh masyarakat kepada orang lain, serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul setelah kegiatan selesai.

j. **Output yang Diharapkan**

Output yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

- Peningkatan kesadaran masyarakat Desa Rappang Barat mengenai dampak pernikahan dini dan stunting.
- Terbentuknya kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif.
- Peningkatan keterampilan ekonomi keluarga untuk mengurangi faktor kemiskinan yang menjadi penyebab pernikahan dini.
- Pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum terkait pernikahan dini.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Rappang Barat mengenai strategi hukum dalam mencegah pernikahan dini untuk menanggulangi stunting berjalan dengan baik dan berhasil mencapai beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi, diskusi kelompok, pelatihan keterampilan ekonomi, dan pendampingan hukum, beberapa hasil utama yang tercatat adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman Masyarakat tentang Dampak Pernikahan Dini dan Stunting

Sosialisasi yang dilakukan di balai desa dan melalui berbagai sesi pelatihan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan serta kaitannya dengan masalah stunting. Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan, terdapat peningkatan yang signifikan dalam hal pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini dan stunting. Sebelum kegiatan, sekitar 60% responden tidak mengetahui secara detail tentang dampak kesehatan pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak, serta dampaknya terhadap risiko stunting. Namun, setelah mengikuti penyuluhan dan diskusi, hampir 90% dari mereka menyatakan bahwa mereka telah memahami dengan baik tentang bahaya pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan serta perkembangan anak.

2) Kolaborasi Antara Aparat Desa dan Masyarakat

Keterlibatan aparat desa dan tokoh masyarakat dalam kegiatan ini menjadi faktor penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan dan stunting. Diskusi yang melibatkan aparat desa setempat mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan bagaimana hal tersebut dapat membantu mencegah pernikahan dini, terbukti dapat membuka wawasan masyarakat. Peningkatan pengetahuan tentang batas usia pernikahan dan konsekuensi hukumnya juga tercatat, di mana aparat desa menyarankan agar kebijakan ini diterapkan secara lebih ketat dan dipantau agar tidak ada pelanggaran terkait pernikahan dini.

3) Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat

Selama kegiatan berlangsung, telah terbentuk beberapa kelompok pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga, terutama perempuan dan anak perempuan. Kelompok ini difasilitasi dengan pelatihan keterampilan ekonomi, yang diharapkan dapat memberikan alternatif pendapatan bagi keluarga yang kurang mampu. Dari pelatihan yang diberikan, sebagian besar peserta mengaku memperoleh manfaat dalam bentuk keterampilan baru yang dapat diterapkan dalam usaha mandiri, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering menyebabkan pernikahan dini.

4) Penerapan Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah berhasil meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak. Banyak orang tua yang hadir dalam kegiatan ini mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui secara mendalam mengenai regulasi yang mengatur pernikahan dini. Melalui pendampingan ini, mereka juga memperoleh pemahaman tentang prosedur hukum jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan usia pernikahan. Beberapa aparat penegak hukum setempat juga turut serta dalam mendukung upaya ini dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menuntut hak-hak tersebut.

B. Pembahasan

Pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Desa Rappang Barat, masih merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur usia minimum pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kenyataannya masih banyak pernikahan dini yang terjadi. Dalam hal ini, faktor sosial, ekonomi, dan budaya sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dini, meskipun mereka tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, edukasi dan pendekatan hukum yang lebih efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu temuan yang menarik dalam kegiatan ini adalah bagaimana keterlibatan aparat desa dan tokoh masyarakat dapat mempercepat perubahan perilaku dalam masyarakat. Melalui penyuluhan yang didukung oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas di tingkat lokal, masyarakat dapat lebih mudah menerima informasi dan lebih sadar akan pentingnya mematuhi regulasi hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat merupakan kunci untuk mencegah pernikahan dini.

Selain itu, pelatihan keterampilan ekonomi yang diberikan kepada keluarga juga menjadi solusi yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan, salah satu faktor utama yang memicu pernikahan dini. Ketika keluarga memiliki alternatif sumber pendapatan yang layak, mereka tidak perlu lagi mempertimbangkan pernikahan dini sebagai solusi atas kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Namun, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya penegakan hukum secara tegas di beberapa daerah. Meskipun regulasi telah ada, namun di tingkat masyarakat, sering kali masih ada yang melanggar aturan tersebut karena faktor budaya atau kepercayaan yang kuat terhadap tradisi tertentu. Oleh karena itu, perlu ada penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dari aparat berwenang untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Gambar Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 1. Pemaparan Materi tentang Strategi Hukum



Gambar 2. Diskusi mendalam pendamping dan Masyarakat terhadap Materi

4. Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai strategi hukum dalam mencegah pernikahan dini untuk menanggulangi stunting di Desa Rappang Barat menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan partisipatif sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak. Melalui penyuluhan, diskusi kelompok, pelatihan keterampilan ekonomi, dan pendampingan hukum, masyarakat desa berhasil memahami dengan lebih baik tentang pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang matang untuk mencegah risiko stunting.

Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah:

- a. Perlu adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengedukasi dan menyosialisasikan bahaya pernikahan dini.
- b. Pemberdayaan ekonomi keluarga harus menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi faktor kemiskinan yang mendorong pernikahan dini.
- c. Penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan tentang usia minimal pernikahan dipatuhi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Desa Rappang Barat.

Diharapkan, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi model untuk desa-desa lain dalam upaya mengurangi pernikahan dini dan stunting di masa depan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

5. Daftar Rujukan

[1] Badan Pusat Statistik. (2019). *Laporan Hasil Survei Perkawinan Dini*. Jakarta: BPS.

- [2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penanggulangan Stunting*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- [3] Kurniawan, D. (2020). "Pernikahan Dini di Indonesia dan Dampaknya terhadap Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 201-210.
- [4] Rahmawati, S. (2019). "Pencegahan Pernikahan Dini untuk Meningkatkan Kesehatan Reproduksi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 120-130.
- [5] Silalahi, S. (2021). "Pernikahan Dini dan Stunting: Analisis Kebijakan di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Sosial*, 18(1), 30-40.
- [6] Silalahi, S., & Hidayat, A. (2021). *Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- [7] Supriyanto, B. (2020). *Strategi Hukum untuk Menanggulangi Stunting di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- [8] World Health Organization. (2020). *Adolescent Pregnancy: A Review of Global Trends*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- [10] Yulianto, M. (2020). "Tantangan dalam Penegakan Hukum untuk Mencegah Pernikahan Dini." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(4), 45-59.

Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Seni Lukisan Bakar di Polewali Mandar

Haidir Ali¹, Muhammad Alwi²

¹ Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

² Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

haidir.kwu21@itbpolman.ac.id, muhammadalwi@itbpolman.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor industri ekonomi kreatif, khususnya dalam bidang kerajinan tangan, dengan fokus pada usaha seni lukisan bakar (pyrography). Sebagai mahasiswa prodi kewirausahaan yang juga merupakan pemilik dari Boring Art, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi mahasiswa yang tertarik untuk terjun ke dunia industri kreatif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan produktivitas individu. Selain itu, usaha ini juga diharapkan dapat mendorong kemajuan perekonomian nasional secara mandiri, dengan memberikan wawasan baru tentang pentingnya pengembangan usaha seni sebagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut di tingkat lokal maupun global.

Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, Seni Lukisan Bakar, Kerajinan Tangan, Kewirausahaan, Perekonomian Nasional

Korespondensi Email : haidir.kwu21@itbpolman.ac.id

Digital Object Identifier : -

Diterima Redaksi : 12-05-2024 | **Selesai Revisi** : 25-05-2024 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2024

1. Pendahuluan

Program Kuliah Kerja Nyata merupakan mata kuliah pendamping yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di setiap program sarjana. Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menyebutkan bahwa tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di perguruan tinggi, kerja inilah dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). (fauzi, Husni, et al.2023)

Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang berfokus pada kegiatan melukis. Dengan dasar pengertian yang sama, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu.

Seni lukis termasuk dalam seni rupa dua dimensi. Seni lukis adalah karya seni rupa dua dimensi yang terbentuk dan tersusun dari unsur-unsur rupa yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni lukis didefinisikan sebagai seni mengenai gambar-menggambar dan lukis-melukis. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Budaya (2019), Drs. Isma Tantawi, M.A. menjelaskan bahwa seni lukis adalah seni yang dikomunikasikan dengan garis dan warna. Garis dan warna sebagai alat seniman untuk mengungkapkan buah pikiran. Tarikan dan model garis, warna, dan tebal-tipisnya warna berperan untuk menyampaikan pesan. Setiap warna memberikan pesan tersendiri. Sedangkan Tri Aru Wiratno dalam Kritik Seni Rupa Berbasis Budaya Kritis (2020) menjelaskan, Seni lukis adalah melukis di atas media kanvas sebagai sebuah ekspresi seorang pelukis dalam mengungkapkan perasaan dan gagasannya. Namun karya seni lukis bukan saja melukis melukis



diatas kanvas tapi di atas media apa saja.

Seni lukis hadir sebagai media ungkapan perasaan yang diwujudkan dalam bentuk visual. (Waluya, 2012). Seni lukis ditujukan sebagai tolak ukur nilai estetika, tanpa mengurangi fungsinya sebagai bahasa rupa untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Secara umum, seni lukis dapat dilakukan oleh siapa saja baik mempunyai keahlian ataupun hanya sekedar sebagai alat penuang kreatifitas. Sebagai salah satu seni rupa yang menarik seni lukis juga telah menjadi industri yang berkembang pesat.

Pyrography (Pyrogravure) atau Pirografi, adalah seni lukis pada kayu atau bahan lainnya dengan cara membakar tanda atau coretan-coretan lukisan yang dihasilkan dari alat yang dipanaskan secara terkendali. Di amerika telah berkembang teknik dengan goresan bara dari kawat filament solder listrik merupakan sesuatu yang baru sebagai dampak perkembangan teknologi dalam teknik pirografi ini. Istilah ini berarti “menulis dengan api”, haal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus seperti solder listrik atau dalam hal modern saat ini dapat menggunakan logam yang dipanaskan dalam api, atau bahkan sinar matahari. (Hasrullah 2019).

Kuliah kerja nyata (KKN) tahun 2024 dengan jalur profesi atau mandiri yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Polewali mandar selama 40 hari, mulai dari tanggal 01 November sampai tanggal 10 Desember yang berlokasi di salah satu usaha ekonomi kreatif yang bernama ‘Boring Art’ di polewali mandar,

Usaha yang diberi nama Boring Art merupakan usaha ekonomi kreatif yang berfokus pada pembuatan seni lukisan bakar dengan menggunakan kayu dan triplek sebagai medianya. Boring art dibendiri sejak 2020 hingga sakarang dan berharap bisa mendorong minat masyarakat khususnya anak muda dari kalangan remaja sampai dewasa agar mampu membuat karya seni yang unik dan membuka peluang untuk berkiprah lebih baik dalam dunia seni dan mampu melihat peluang bisnis bagi para pemuda yang mempunyai kreativitas dalam bidang seni lukis.

Untuk mengembangkan kreativitas pemuda dan pemudi dalam bidang seni lukis dengan media kanvas yang berbeda dengan teknik yang berbeda sehingga menambah ketertarikan untuk mencoba hal yang baru, apalagi seni lukis bakar ini adalah sesuatu hal yang baru dan masih sangat minim diketahui dalam seni khususnya Polewali Mandar bahkan dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, bila usaha ini mampu berkembang pada skala local, usaha ini akan diperluas di berbagai kabupaten di Sulawesi Barat. Sehingga mampu meningkatkan pengetahuan lebih mengenai seni khususnya seni lukis bakar (pyrografi) dengan melakukan promosi yang akan ditingkatkan melalui kerja sama dengan kelompok seni lainnya dan menjadikan seni lukis bakar (pyrografi) ini menjadi media penyimpan kenangan oleh-oleh atau souvenir bagi masyarakat yang menggemari seni..

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan ini merupakan program kuliah kerja nyata (KKN) dengan memilih jalur profesi dilaksanakan di Workshop dan Galeri Boring Art yang berletak di Kec Mapilli, Kab Polewali Mandar
2. Jadwal operasional dibuka 24 jam open order pada akun Boring Art maupun akun pribadi berikut. Instagram @Boring_art_official, Facebook @Boring Art, Tiktok @Haidirali432, Whatsapp 081354546364
3. Melakukan Promosi Digital dengan cara membuat video pendek dan mengunggahnya lewat akun Instagram @Boring_art_official, Facebook @Boring Art, Tiktok @Haidirali432, Whatsapp 081354546364

4. Sumber Daya Manusia (SDM), penulis dan juga sebagai pemilik dari Boring Atr menjalankan dan mengembangkan usaha ini secara mandiri dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan bahan baku kemudian pembuatan sampai dengan pemasaran dan pengaturan keuangan.
5. Alat dan bahan yang digunakan yaitu, mesin lukis bakar dan alat – alat pertukangan serta bahan yang digunakan adalah kayu jati putih.

3. Hasil dan pembahasan

Seni lukis hadir sebagai media ungkapan perasaan yang diwujudkan dalam bentuk visual. Seni lukis ditujukan sebagai tolak ukur nilai estetika, tanpa mengurangi fungsinya sebagai bahasa rupa untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Secara umum, seni lukis dapat dilakukan oleh siapa saja baik mempunyai keahlian ataupun hanya sekedar sebagai alat penguang kreatifitas. Sebagai salah satu seni rupa yang menarik seni lukis juga telah menjadi industri yang berkembang pesat.

Pembangunan disektor kerajinan tangan usaha ekonomi kreatif seni lukis bakar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup dengan terciptanya lapangan kerja Dan meningkatkan produktivitas bagi setiap individu serta mendorong kemajuan perekonomian Nasional secara mandiri. Fokus pemerintah dan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang besar akhir ini membawa keputusan pemerintah untuk lebih mengintensifkan eksplorasi dan eksploitasi dengan membentuk beberapa kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat.

Maka pembahasan ini penulis memilih kerajinan usaha ekonomi kreatif seni rupa lukisan bakar (Tipografi) ini sebagai hal yang baru di Polewali Mandar. Dengan demikian kami memanfaatkan sumber daya manusia khususnya penulis sebagai mahasiswa kewirausahaan agar dapat menambah wawasan dan keterampilan agar lebih tertarik dan menikmati karya seni dengan berbagai jenis. Dengan potensi ini diharapkan kerajinan seni rupa ini tidak saja mampu menjadi sekedar hobi atau usaha sampingan, namun juga sebagai penghasil pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKNP) merupakan program yang dirancang khusus oleh perguruan tinggi untuk mengintegrasikan antara pendidikan akademik dengan pengalaman langsung di lingkungan kerja profesional. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia industry atau profesi yang relevan dengan bidang studi mereka, sehingga mereka bisa menerapkan ilmu pengetahuan teoritis yang di dapatkan selama perkuliahan dalam konteks praktis di lapangan.(Aulia, et al.2024)

Pada gambar pilihan dibawah ini merupakan proses pembuatan produk selama program kuliah kerja nyata (KKN) dengan jalur profesi yang dilaksanakan oleh penulis di Workshop dan Galeri Boring Art yang berada di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebagai berikut:

Gambar proses pembuatan produk



Gambar 1 Proses pemotongan papan untuk media lukisan bakar



Gambar 1 Proses penghalukan media plakat



Gambar 2 Proses pembuatan selamat datang wisata



Gambar 4 Proses pembuatan lukisan bakar

4. Simpulan

perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang seni rupa maka pengembangan disektor kerajinan tangan usaha ekonomi kreatif seni lukis bakar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup dengan terciptanya lapangan kerja Dan meningkatkan produktivitas bagi setiap individu serta mendorong kemajuan perekonomian Nasional secara mandiri.Melalui Kuliah kerja nyata (KKN) tahun 2024 dengan jalur profesi atau mandiri yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Polewali mandar selama 40 hari, mulai dari tanggal 01 Maret sampai tanggal 10 Mei penulis memilih kerajinan usaha ekonomi kreatif seni lukisan bakar (Tipografi) ini sebagai hal yang baru di Polewali Mandar. Dengan demikian kami memanfaatkan sumber daya manusia khususnya penulis sebagai mahasiswa kewirausahaan agar dapat menambah wawasan dan keterampilan agar lebih tertarik dan menikmati karya seni dengan berbagai jenis. Dengan potensi ini diharapkan kerajinan seni rupa ini tidak saja mampu menjadi sekedar hobi atau usaha sampingan, namun juga sebagai penghasil pendapatan tambahan bagi masyarakat.

5. Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swt atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapatdiselesaikan dengan baik.penulis ucapkan terimah kasih kepada pihak yang telah membantu.

1. (Bapak Muhammad Alwi,S.Pd.,M.M.)Selaku dosen pendamping lapangan yang telah membantu selama program KKN berlangsung bahkan dalam proses penyelesaian jurnal ini.
2. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan informasi dalam menyelesaikan jurnal pengabdian kepada masyarakat tersebut.
3. Serta teruntuk diriku sendiri dan orang tuaku, Terima kasih telah masih menyemangatiku sampai titik ini

Daftar Pustaka

- 1) Aulia, Aulia, et al. "Inovasi Mahasiswa KKN Profesi Dalam Meningkatkan Minat Kunjungan Mahasiswake UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Enrekang." *LESTARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.02 (2024): 115-121. 20 Desember 2024.
- 2) Fauzi, Husni, et al. "PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI DESA SRIMUKTI KABUPATEN BEKASI." *SAFARI: JurnalPengabdian Masyarakat Indonesia* 3.3 (2023): 155-166. 21 Desember 2024.
- 3) Regiana, Asep. (2017). Analisis Penciptaan Karya Seni Rupa 2 Dimensi. <http://miiftahuljannah09.blogspot.com/2017/11/analisis-penciptaan-karya-seni-rupa-2.html> . Diakses 21 Desember 2024.
- 4) Nurmihtasin. (2020). Sebutkan dan jelaskan teknik melukis! <https://brainly.co.id/tugas/7892567> . Diakses 21 Desember 2024.
- 5) Unknown. (2014). Makalah Apresiasi Seni. <http://insaninurutamii.blogspot.com/2014/09/makalah-apresiasi-seni.html> . Diakses 22 Desember 2024.
- 6) Damajanti,I.M.(2015).AnalisiGagasanSenimanGenerasiMilennialdalam InklusivitasSe Rupa Indonesia. *Jurnal Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB* , 2-3.
- 7) Budhiyanto, M.(2013).SeniMasa Kini:Catatan tentang "Kontemporer" .Guru-GuruMuda, Langgeng Art Foundation , 15.
- 8) Suhernawan, R., & Nugraha, R. A. (2010). Seni Rupa. <https://www.academia.edu/download/64107700/Seni%20Rupa.pdf> Diakses 22 Desember 2024.
- 9) Regiana, Asep. (2017). Analisis Penciptaan Karya Seni Rupa 2 Dimensi. <http://miiftahuljannah09.blogspot.com/2017/11/analisis-penciptaan-karya-seni-rupa-2.html>. Diakses 22 Desember 2024.
- 10) Unknown. (2014). Makalah Apresiasi Seni. <http://insaninurutamii.blogspot.com/2014/09/makalah-apresiasi-seni.html>. Diakses 22 Desember 2024

Pengembangan Edukasi Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Menghadapi Era Digitalisasi : Studi Kasus SMP Negeri 3 Tapango

Ahri Rahman¹, Muhammad Alwi²

¹Agribisnis, ²Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar
Ahri.agr21@itbmpolman.ac.id, muhammadalwi@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Pengembangan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi siswa-siswi yang sudah ada. Proses ini bertujuan untuk membantu mereka mencapai prestasi yang lebih baik dan berkembang secara holistik, baik dalam aspek akademik, keterampilan, maupun karakter. Melalui berbagai program atau metode, pengembangan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selain itu, pengembangan juga mencakup upaya membina siswa baru agar dapat beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan belajar yang kondusif. Dengan pendekatan yang terarah, siswa baru dapat diarahkan untuk mencapai potensi maksimal mereka sejak dini. Proses ini melibatkan pendampingan, penilaian, dan pembinaan yang berkelanjutan sehingga semua siswa, baik yang lama maupun yang baru, dapat tumbuh menjadi individu yang kompeten dan berprestasi. Penentuan tujuan pelaksanaan kegiatan Dampak dalam kegiatan tersebut Penggunaan teknologi digital. Evaluasi dan monitoring Penerapan kegiatan . Penerapan teknologi digital di SMP Negeri 3 Tapango telah mulai mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Beberapa perangkat teknologi yang digunakan Penerapan teknologi digital ini juga telah di terapkan pada saat kegiatan ulangan Tengah semester yang Dimana siswa dan siswi lebih mudah dalam mengerjakan soal soal yang diberikan dengan metode pembelajaran berbasis digital. Teknologi digital diterapkan di SMP Negeri 3 Tapango untuk mengintegrasikan pembelajaran. Mereka menggunakan komputer, proyektor, dan aplikasi pembelajaran digital. Sekolah ini juga menggunakan Google Classroom untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Namun, masih ada tantangan seperti akses internet dan perangkat yang kurang memadai. Guru menjadi fasilitator dalam mengembangkan keterampilan digital siswa. Pelatihan tentang teknologi digital penting bagi guru. Pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas fisik, era digital membutuhkan paradigma baru. Siswa diharapkan lebih mandiri dalam mencari informasi dan mengembangkan keterampilan digital. Manfaat digital bagi siswa SMP termasuk akses pendidikan yang lebih luas, namun juga ada dampak negatif seperti ketergantungan pada internet dan masalah kesehatan fisik dan mental. Cyberbullying dan risiko keamanan online juga merupakan dampak negatif. Pencegahan dilakukan dengan menyediakan edukasi tentang penggunaan gadget yang sehat, memfasilitasi kegiatan fisik dan kreativitas. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat penting untuk kesuksesan pengembangan edukasi digital di sekolah. Meningkatkan literasi digital siswa penting untuk mempersiapkan mereka untuk masa depan.

Kata kunci: Edukasi, Penggunaan teknologi digital, Penerapan, Hasil.

Korespondensi Email : ahri.agr21@itbmpolman.ac.id

Digital Object Identifier : -

Diterima Redaksi : 12-05-2024 | **Selesai Revisi** : 25-05-2024 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2024

1. Pendahuluan

Pengembangan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi siswa-siswi yang sudah ada. Proses ini bertujuan untuk membantu mereka mencapai prestasi dan berkembang secara holistik baik dalam aspek akademik keterampilan dan karakter. Melalui berbagai program atau metode, pengembangan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selain itu, pengembangan juga mencakup upaya membina siswa baru agar dapat beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan belajar yang kondusif. Dengan pendekatan yang terarah, siswa baru dapat diarahkan untuk mencapai potensi maksimal mereka sejak dini. Proses ini melibatkan pendampingan, penilaian, dan pembinaan yang berkelanjutan sehingga semua siswa, baik yang lama maupun yang baru, dapat tumbuh menjadi individu yang kompeten dan berprestasi. Sari, R. K. (2021).

Edukasi adalah proses pendidikan yang dirancang secara terencana oleh seseorang dengan tujuan untuk memberikan pengaruh positif kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Melalui upaya ini,



diharapkan tercipta perubahan yang signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Pendidikan berperan sebagai alat untuk membuka wawasan dan penembangan diri Dengan adanya edukasi berbagai potensi yang dimiliki oleh individu atau kelompok dapat dioptimalkan untuk mencapai kemajuan. Proses ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada lingkungan sosial secara keseluruhan sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih baik dan harmonis Edukasi menjadi sarana penting dalam membentuk kualitas kehidupan yang lebih bermakna dan berdaya saing Harefa, D. (2022).

Digitalisasi adalah proses mengubah media informasi dari format analog ke format digital. Secara umum, digitalisasi melibatkan transformasi data dari bentuk fisik atau tercetak menjadi bentuk elektronik yang lebih mudah diakses dan dikelola. Proses ini bertujuan untuk mempermudah penyimpanan informasi, meningkatkan efisiensi pengolahan data, serta mendukung akses yang lebih cepat dan luas. Proses digitalisasi biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi pemindaian (scan) untuk mengonversi dokumen fisik menjadi halaman elektronik. Halaman elektronik tersebut dirancang agar dapat disimpan, ditemukan kembali, dan ditransmisikan melalui perangkat komputer. Dengan digitalisasi, informasi menjadi lebih praktis untuk diarsipkan, diakses, atau dibagikan dalam berbagai keperluan, baik untuk kebutuhan pribadi, organisasi, maupun masyarakat Yulianti, D. T., Damayanti, D., & Prastowo, A. T. (2021).

Kemajuan teknologi yang begitu pesat, serta keterkaitan yang semakin erat di antara berbagai inovasi teknologi, telah menciptakan fenomena baru yang belum pernah ada pada masa Revolusi Industri 1. Fenomena ini dikenal sebagai transformasi Industri 4.0, di mana teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu elemen kunci yang mendukung perkembangan tersebut. Industri 4.0 berfokus pada peningkatan efisiensi dan inovasi dalam sektor produksi melalui pemanfaatan teknologi canggih. Di sisi lain, konsep Society 5.0 muncul sebagai pendekatan yang menempatkan manusia sebagai inti dari inovasi, dengan tujuan memaksimalkan manfaat dari teknologi yang dihasilkan oleh Industri 4.0. Society 5.0 tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kehidupan manusia secara holistik, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Ayub, M. R. S. S. N., Kristiyanto, W. H., Sudjito, D. N., Noviani, D., Sudarmi, M., & Santhalia, P. W. (2022).

Meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi menjadi langkah penting untuk mendukung penguasaan mereka terhadap berbagai aspek teknologi modern. Di era digital saat ini, kemampuan ini tidak hanya diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran, tetapi juga untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dan peluang di masa depan yang semakin berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi yang efektif oleh siswa-siswi dapat memberikan mereka keunggulan dalam mengeksplorasi informasi, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi teknologi harus menjadi prioritas dalam pendidikan, dengan menyediakan pelatihan, fasilitas, dan sumber daya yang mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi secara optimal Asnawati, A., Kanedi, I., Sari, V. N., Zulfiandry, R., & Mahdalena, D. (2024). Pendidikan di tingkat ini memiliki peran penting dalam membangun dasar pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menghadapi tantangan pendidikan yang lebih lanjut Pendidikan menengah yang berkualitas dapat memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan keterampilan yang inovatif dan kompeten selaras dengan kemajuan teknologi dan industrialisasi yang semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari Hamdani, F., Fauzia, A., Efendi, L. A., Liani, S. S., Togatorop, M., Ramadhani, R. W., & Yunita, Y. (2022).

Pendidikan memiliki peran krusial dalam mempersiapkan generasi masa depan agar siap menghadapi tantangan di era digitalisasi yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, pendidikan menjadi fondasi penting untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah arus perkembangan teknologi yang begitu cepat, pendidikan harus mampu mengintegrasikan literasi digital dan penguasaan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan generasi masa depan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga inovator yang mampu menciptakan solusi baru untuk menghadapi berbagai tantangan global Suyitno, S., Wahyuningsih, Y., Febrianti, D., Anisah, A. K., & Wardana, A. W. (2024). Literasi digital memungkinkan siswa untuk memilah informasi yang tepat dan berguna, sekaligus mendorong rasa ingin tahu serta eksplorasi lebih mendalam. Dengan literasi digital yang baik, siswa dapat mengoptimalkan potensi diri mereka dan menjadi pembelajar yang lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan pesat di era digital Naufal, H. A. (2021).

Meningkatkan pengetahuan tentang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) di tingkat pendidikan menengah menjadi hal yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa bersaing di dunia usaha dan industri. Pemahaman mendalam tentang teknologi ini dapat memberikan mereka keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan yang semakin berbasis digital. Dengan mengintegrasikan konsep dan aplikasi kecerdasan buatan ke dalam kurikulum, siswa dapat mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan inovasi teknologi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing mereka, tetapi juga membantu menciptakan sumber daya manusia yang siap berkontribusi secara aktif dalam kemajuan industri dan perkembangan ekonomi global Wulandari, P., & Fitrianiingsih, D. (2024). Di era saat ini, siswa perlu menguasai keterampilan membaca untuk menghadapi masa depan Salah satu keterampilan dasar tersebut adalah literasi digital Aisyah, T. F. (2022).

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan pengetahuan digitalisasi siswa-siswi sebagai berikut:

a. Penentuan tujuan pelaksanaan kegiatan

Digitalisasi pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai teknologi digital ke dalam sistem pendidikan mulai dari kurikulum metode pembelajaran penilaian hingga administrasi sekolah Digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Dengan kata lain digitalisasi berupaya mengubah cara pendidikan dilakukan dari model konvensional menjadi model yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman

b. Dampak dalam kegiatan tersebut

Digitalisasi telah merambah hampir semua aspek kehidupan termasuk pada bidang pendidikan Seiring dengan perkembangan teknologi sekolah-sekolah di seluruh dunia semakin beradaptasi dengan penggunaan alat-alat digital dalam proses belajar mengajar Dampak digitalisasi pada kualitas pendidikan di sekolah adalah topik yang relevan dan penting untuk dibahas. Artikel ini akan menguraikan bagaimana digitalisasi memengaruhi kualitas pendidikan, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk memaksimalkan manfaat teknologi dalam pendidikan.

c. Penggunaan teknologi digital

Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi classroom untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh seperti zoom atau google meet

d. Evaluasi dan monitoring

mengevaluasi dan memantau proses pembelajaran dan pengembangan edukasi

e. Penerapan kegiatan

penerapan kegiatan dilakukan pada saat siswa dan siswi sedang melakukan ujian Tengah semester yang Dimana kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan Hp.

Kegiatan pengembangn digitalisasi pada siswa dn siswi di SMP NEGRI 3 TAPANGO semoga dapat membantu dalam peningkatan pengetahuan siswa-siswi tentang teknologi digital.

3. Hasil dan pembahasan

A. Hasil

Penerapan teknologi digital di SMP Negeri 3 Tapango telah mulai mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran Beberapa perangkat teknologi yang digunakan diantaranya adalah perangkat komputer proyektor dan aplikasi pembelajaran berbasis digital yang memfasilitasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar Dalam upaya mendukung pembelajaran jarak jauh atau blended learning sekolah ini menggunakan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom dan aplikasi pendidikan lainnya yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi berdiskusi dan mengerjakan tugas secara online

Penerapan teknologi digital ini juga telah di terapkan pada saat kegiatan ulangan Tengah semester yang Dimana siswa dan siswi lebih mudah dalam mengerjakan soal soal yang diberikan dengan metode pembelajaran berbasis digital.

B. Pembahasan

Meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan teknologi masih ada beberapa tantangan yang dihadapi Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur seperti akses internet yang belum merata di daerah tertentu serta kurangnya perangkat teknologi yang memadai untuk setiap siswa Hal ini menjadi hambatan bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis digital secara maksimal peran Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang sangat diperlukan di era modern Oleh karena itu peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan tentang teknologi digital sangat penting agar mereka bisa mengoptimalkan penggunaan media digital dalam pembelajaran Era digital menuntut adanya perubahan paradigma dalam pendidikan Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik tetapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja Siswa diharapkan lebih mandiri dan aktif dalam mencari informasi serta mengembangkan keterampilan digital yang berguna untuk kehidupan mereka di masa depan Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan. Namun, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kecanduan gadget atau penurunan interaksi sosial antar siswa. Keterlibatan Stakeholder Keberhasilan pengembangan edukasi digital di SMP Negeri 3 Tapango juga bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah yang menyediakan infrastruktur teknologi hingga masyarakat yang mendukung pengembangan keterampilan digital di kalangan siswa.

Digital memiliki banyak manfaat bagi anak remaja SMP salah satunya adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dengan menggunakan internet siswa dan siswi dapat mencari informasi dari berbagai sumber dan belajar materi pelajaran secara mandiri dan bahkan dapat mengikuti kursus online hal ini dapat membantu mereka memperluas pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk pendidikan kedepannya namun ada beberapa dampak yang dihadapi dalam peningkatan literasi digital pada siswa dan siswi yakni seperti:

1. ketergantungan dan kecanduan pada dampak yang diterimannya maka siswa dan siswi bisa saja sepenuhnya tergantung pada internet dan dapat mengurangi niat baca pada peserta didik
2. Masalah Kesehatan Fisik dan Mental Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur, sakit kepala, masalah penglihatan, dan nyeri otot. Selain itu, paparan konten negatif di media sosial dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, dan masalah citra tubuh pada siswa.
3. Cyberbullying dan Risiko Keamanan Online Gadget dapat menjadi sarana bagi pelaku cyberbullying untuk melecehkan, mengintimidasi, atau mengancam korban secara online. Selain itu, siswa yang tidak berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi secara online dapat menjadi sasaran penipuan, pencurian identitas, atau eksploitasi seksual.

Maka dari itu dilakukan pencegahan dengan Menyediakan program edukasi tentang penggunaan gadget yang sehat dan aman. Memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong aktivitas fisik dan kreativitas.

4.Lampiran gambar

Proses kegiatan pembelajaran ulangan tengah semester (uts) dengan menggunakan digital



5. Kesimpulan

Teknologi digital diterapkan di SMP Negeri 3 Tapango untuk mengintegrasikan pembelajaran. Mereka menggunakan komputer, proyektor, dan aplikasi pembelajaran digital. Sekolah ini juga menggunakan Google Classroom untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Namun, masih ada tantangan seperti akses internet dan perangkat yang kurang memadai. Guru menjadi fasilitator dalam mengembangkan keterampilan digital siswa. Pelatihan tentang teknologi digital penting bagi guru. Pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas fisik, era digital membutuhkan paradigma baru. Siswa diharapkan lebih mandiri dalam mencari informasi dan mengembangkan keterampilan digital. Manfaat digital bagi siswa SMP termasuk akses pendidikan yang lebih luas, namun juga ada dampak negatif seperti ketergantungan pada internet dan masalah kesehatan fisik dan mental. Cyberbullying dan risiko keamanan online juga merupakan dampak negatif. Pencegahan dilakukan dengan menyediakan edukasi tentang penggunaan gadget yang sehat, memfasilitasi kegiatan fisik dan kreativitas. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat penting untuk kesuksesan pengembangan edukasi digital di sekolah. Meningkatkan literasi digital siswa penting untuk mempersiapkan mereka untuk masa depan.

6. Daftar Rujukan

- [1] Guru, I. P., & Belawati, T. In Action.
- [2] Riandhy, B., Anton Ranteallo, S. S., H Sahabuddin Kasim, M. H. I., Suharli, H., Abidin, M., Mulkan, M., & Ismail, N. S. (2022). *Moderasi Beragama dalam Pandangan Aktor-Aktor Kerukunan Provinsi Sulawesi Barat*.
- [3] Sari, R. K., Mudjiran, M., Fitria, Y., & Irsyad, I. (2021). Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik berbantuan permainan edukatif di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5593-5600.
- [4] Harefa, D., Sarumaha, M., Telaumbanua, K., Telaumbanua, T., Laia, B., & Hulu, F. (2023). Relationship student learning interest to the learning outcomes of natural sciences. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240-246.
- [5] Yulianti, D. T., Damayanti, D., & Prastowo, A. T. (2021). Pengembangan Digitalisasi Perawatan Kesehatan Pada Klinik Pratama Sumber Mitra Bandar Lampung. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 32-39.
- [6] Ayub, Made Rai Suci Shanti Nurani, Wahyu Hari Kristiyanto, Debora Natalia Sudjito, Diane Noviadini, Marmi Sudarmi, and Prima Warta Santhalia. "Pembinaan Guru di SMA Swasta Kabupaten Wonosobo: Menuju Pembelajaran Abad 21 Society 5.0." *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 330-340.
- [7] Hamdani, F., Fauzia, A., Efendi, L. A., Liani, S. S., Togatorop, M., Ramadhani, R. W., & Yunita, Y. (2022). Pentingnya pengembangan soft skills generasi milenial dalam menghadapi tantangan pasca pandemi covid-19. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 485-494.
- [8] Hamdani, F., Fauzia, A., Efendi, L. A., Liani, S. S., Togatorop, M., Ramadhani, R. W., & Yunita, Y. (2022). Pentingnya pengembangan soft skills generasi milenial dalam menghadapi tantangan pasca pandemi covid-19. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 485-494.
- [9] Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195-202.
- [10] Wulandari, P., & Fitrianiingsih, D. (2024). Akuntansi 4.0 Dengan Peningkatan Kompetensi Melalui Pelatihan Artificial Intelligence Bagi Siswa-Siswi SMK Jurusan Akuntansi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1041-1049.
- [11] Khasanah, U., & Herina, H. (2019, March). Membangun karakter siswa melalui literasi digital dalam menghadapi pendidikan abad 21 (revolusi industri 4.0). In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.

Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Percepatan Penurunan Stunting

Idham darwis¹, Miftahul Rahman²

¹Agribisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

¹idham.agr21@itbmpolman.ac.id, ²Miftahurrahman@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Stunting dapat memberikan dampak pada berbagai sektor, baik kesehatan serta ekonomi. Dampak pada kesehatan: balita yang mengalami stunting memiliki volume otak yang lebih kecil daripada balita yang sehat, terlahir dengan berat badan yang rendah, perkembangan kognitif dan motorik terhambat, dan pada saat dewasa rentan mengalami gangguan metabolik. Dampak pada ekonomi menurut The World Bank, Indonesia berpotensi mengalami kerugian sebesar 260-390 triliun per tahun jika Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 13.000 triliun. Luasnya dampak yang ditimbulkan stunting, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi percepatan penurunan stunting, salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap percepatan penurunan *stunting*. Penelitian ini menggunakan metode *review literature* dengan menggunakan sumber database *Google Scholar* dan pencarian jurnal didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi agar sesuai rentang waktu 2 tahun terakhir. Literatur yang ditemukan yaitu berjumlah 4 literatur. Hasil yang didapatkan menunjukkan pemberdayaan masyarakat melalui kader posyandu untuk mencegah *stunting* telah berjalan dengan baik dengan beberapa kegiatan seperti pelatihan fortifikasi pangan, pembelajaran lapangan terpadu dan melatih keterampilan deteksi dini kejadian *stunting*. Diharapkan dari penelitian *literature review* ini bisa menjadi acuan dan strategi yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting*.

Kata Kunci : Stunting, pemberdayaan masyarakat, posyandu, percepatan penurunan, literature review

Korespondensi Email : idham.agr21@itbmpolman.ac.id

Digital Object Identifier : -

Diterima Redaksi : 12-05-2024 | **Selesai Revisi** : 25-05-2024 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2024

1. Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi tinggi badan anak tidak normal karena kebutuhan nutrisi sejak berada dalam kandungan hingga berusia 2 tahun kurang terpenuhi. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO, 2020), Indonesia berada pada posisi 2 tertinggi di Asia Tenggara setelah Laos dengan 36,4 % balita mengalami *stunting*. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (2018), angka stunting di Indonesia adalah 30,8%, yang berarti 1 dari 3 anak balita di Indonesia menderita *stunting*. *Stunting* merupakan gangguan kesehatan yang bersifat multifaktorial meliputi asupan nutrisi, penyakit infeksi berulang, hormon pertumbuhan, dan asap rokok. Di Indonesia masyarakat banyak yang memiliki persepsi bahwa *stunting* diakibatkan oleh faktor keturunan (Aryastami & Tarigan, 2017). Namun, hasil penelitian menyatakan bahwa faktor keturunan memiliki peran kecil dalam terjadinya *stunting*, yakni sebesar 15%. *Stunting* juga berdampak pada biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual balita. Dampak biologisnya, yaitu memiliki tinggi dan berat badan di bawah normal.

Dampak psikologis, yaitu anak memiliki kepercayaan diri yang rendah dan berisiko pula memunculkan masalah keluarga terutama ketika menginjak usia remaja. Selain itu, anak dengan *stunting* juga mudah cemas dan rentan mengalami depresi (Rafika, 2019). Dampak sosiologisnya, yaitu sering mengurung diri. Dan dampak spiritualnya, yaitu muncul rasa ketidakpercayaan anak terhadap Tuhan sehingga jarang berdoa.

2. Metode pelaksanaan

Pada karya ini kami menggunakan metode penelitian studi literatur. Studi literatur merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan (buku, jurnal, majalah) yang diacu hendaknya relevan dan terbaru (*state of art*) serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur *review* adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang

3. Hasil dan Pembahasan

Literatur yang ditemukan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai strategi percepatan penurunan *stunting*. *Literature review* ini menggunakan empat literatur yang diterbitkan dua tahun terakhir. Semua literatur menggunakan bahasa Indonesia, hal ini dikarenakan peneliti melihat karakteristik keluarga dan pola asuh orang tua terhadap anak di Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Dari ke 4 literatur, semua literatur yang menggunakan desain *cross sectional*. Populasi penelitian yang digunakan yaitu balita yang mengalami *stunting*. Karakteristik usia responden pada semua penelitian dalam rentang usia balita (2-5 tahun). Sampel yang digunakan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Tujuan dari *literature review* ini untuk merangkum literatur mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai strategi percepatan penurunan *stunting*. Literatur yang dipilih menganalisis pemberdayaan masyarakat sebagai strategi percepatan penurunan *stunting*. Dari jurnal pertama, pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan kader posyandu dalam fortikasi pangan organik berbasis pangan lokal. Dengan adanya fortikasi pangan organik berbasis pangan lokal akan dapat mengimplementasikan salah satu dari lima pilar dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, yakni gizi dan ketahanan pangan. Hal tersebut dapat terjadi karena dapat memperbaiki pemenuhan asupan gizi balita yang memiliki risiko *stunting* dan hemat biaya serta sumber pangannya berlimpah karena merupakan pangan lokal. Kader posyandu dipilih sebagai sasaran dalam pelatihan ini karena kader akan menjadi penggerak utama di masyarakat dalam mempromosikan fortikasi pangan organik ini.

Dalam jurnal kedua, pengabdian yang dilakukan berupa pemberian pembelajaran melalui Praktik Lapangan Terpadu (PLT). PLT ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Melalui MBKM ini mahasiswa/i diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mengatasi persoalan yang ada. Salah satu persoalan tersebut yaitu *stunting*. Sebelum mahasiswa/i diterjunkan ke masyarakat akan mendapat pembekalan terlebih dahulu sehingga kegiatannya dapat berjalan lancar dan maksimal. Mahasiswa/i di lapangan akan melakukan pendampingan untuk penguatan kelembagaan di tingkat basis seperti PKK dan Karang Taruna agar mampu berpartisipasi aktif dalam menurunkan angka *stunting*. Pemilihan PKK sebagai sasaran dampingan karena mereka sangat dekat dengan keseharian masyarakat dan pemilihan Karang Taruna sebagai sasaran dampingan karena erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi remaja. Dalam jurnal ketiga, penelitian ini menekankan pada pengabdian masyarakat dengan sasaran ibu yang memiliki anak usia 0-24 bulan berisiko *stunting* sebanyak 30 orang ibu. Penetapan ibu-ibu sebagai sasaran utama karena sesuai dengan target yaitu mencegah *stunting* pada anak usia 0-24 bulan, karena seorang ibu akan lebih dominan berinteraksi dengan sang buah hati sehingga tidak memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh pola asuh seorang ibu. Sehingga pemberian pelatihan dan pendampingan kepada seorang ibu bisa dilakukan untuk meningkatkan sikap dan pengetahuan. Dari kegiatan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan berjalan dengan baik dengan hasil adanya peningkatan rata-rata skor pengetahuan dan sikap ibu setelah diberikan pendampingan tentang pemenuhan gizi balita.

Dari jurnal keempat, pada saat dilakukan pelatihan para kader. Kader digunakan sebagai sasaran karena kader merupakan perantara yang akan memfasilitasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai *stunting*, memantau tumbuh kembang balita dan memberikan nutrisi yang baik untuk balita sesuai dengan cara plot dalam buku KMS. Setelah pelatihan diharapkan kader mampu melakukan deteksi dini *stunting* dan memberikan edukasi tentang pencegahan *stunting*, terutama pemberian makanan kepada balita dan cara plot di buku KMS, serta mendeteksi dan mempromosikan pencegahan *stunting* di sekitar rumah mereka. Media

ekuisi yang digunakan dalam pencegahan *stunting* pada penelitian ini adalah video edukasi dan pembuatan taman baca untuk anak-anak. Media edukasi ini dipilih karena mampu menampilkan gambar bergerak dan suara yang akan menjadi suatu daya tarik tersendiri karena ibu-ibu yang diberikan penyuluhan mampu menyerap pesan atau informasi dengan menggunakan lebih dari satu indera di bandingkan dengan metode ceramah.

Temuan pada keempat *literature review* ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai strategi percepatan penurunan *stunting* dapat melalui pembentukan kader baik itu berupa kader posyandu, maupun pemberdayaan ibu PKK. Perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat berupa rencana aksi pencegahan, sosialisasi dan workshop membuat media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (Purnomo dkk, 2021). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan literatur-literatur yang didapatkan, yang menjelaskan bahwa adanya peningkatan pengetahuan kader posyandu. Selain itu, dalam penelitian Mahyuddin dkk,2021 juga menjelaskan terjadinya peningkatan rata-rata skor pengetahuan dan sikap ibu tentang pemenuhan gizi baduta setelah dilakukan pendampingan



Gambar 1 Posyandu dusun landi desa landi kanusuang



3. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil *literature review* pemberdayaan masyarakat sebagai strategi percepatan penurunan *stunting* melalui kader posyandu, terdapat peningkatan pengetahuan yang didapatkan oleh kader posyandu melalui beberapa kegiatan dilakukan selama pemberdayaan masyarakat.. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan fortifikasi pangan, pembelajaran lapangan terpadu dan melatih keterampilan deteksi dini kejadian *stunting*. Kegiatan ini akan terus dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, karena deteksi dini *stunting* akan mudah dilakukan apabila kemampuan kader posyandu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik. Sehingga diharapkan untuk kader posyandu dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk membantu menekan jumlah *stunting* di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal pengabdian kepada masyarakat.Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Miftahur Rahman S.Frm.,selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini.Komitmen dan perhatian Bapak menjadi motivasi besar bagi saya untuk menyelesaikan jurnal ini dengan baik.
2. Orang tua saya,yang selalu memberikan dukungan moral,doa,dan kasih sayang tanpa henti selama saya menyelesaikan jurnal ini.
3. Teman-teman dan rekan seperjuangan,yang telah memberikan semangat,ide,serta kerja sama yang luar biasa selama proses ini berlangsung.
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu,tetapi telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung proses penyelesaian jurnal ini.

Daftar pustaka

- Candra MKes(Epid), D. A. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. In *Epidemiologi Stunting*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrwxw_53QaJhPmUA3w_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1638052344/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F80670%2F1%2FBuku_EPIDEMIOLOGI_STUNTING_KOMPLIT.pdf/RK=2/RS=BFSY8aq0Lx1bh a7MtI8PgWqWYU-
- Dan, S., Menyambut, B., Fitri, I., Tengah, D. I., Sefrina, L. R., Wijaya, H. H., & Gifari, N. (2020). Jurnal abdimas kesehatan Tasikmalaya. *Jurnal Abdimas Kesehatan Tasikmalaya*, 02, 5–8.
- Hildagardis Meliyani Erista Nai, H. A. P., Christina, & Widiand, R. (2019). Jurnal Abdimas Saintika. *Jurnal Abdimas Saintika*, 1(1), 1–8.
- Ketut Aryastami, N., & Tarigan, I. (2017). Policy Analysis on Stunting Prevention in Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240.
- Khoeroh, H., Handayani, O. W. K., & Indriyanti, D. R. (2017). Evaluasi Penatalaksanaan Gizi Balita Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Sirampog. *Unnes Journal of Public Health*, 6(3), 189. <https://doi.org/10.15294/ujph.v6i3.11723>
- Rafika, M. (2019). Dampak Stunting Pada Kondisi Psikologis Anak. *Buletin Jagaddhita*, 1(1), 1–4. <http://dx.doi.org/10.4236/ojpm.2016.54007>
- Wati, N. B., Kania, I., Purnawan, & Mufti. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 333–349. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3647>
- Wulandari, S. T. R. I. (2021). *Karya tulis ilmiah asuhan keperawatan pada anak stunting dengan defisit nutrisi di desa kalirejo bangil*. http://eprints.kertacendekia.ac.id/id/eprint/585/1/KTI_SINTA_TRI
WULANDARI.pdf

Pendampingan Penyusunan Eletronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) Pada Kelompok Tani di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Mardawati¹, Muhammad Alwi²

¹Program Studi Agribisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Teknologi Muhammadiyah

²Jurusan Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Teknologi Muhammadiyah

mardawati.agr21@itbmpolman.ac.id*, muhammadalwi@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di kelompok tani Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Sektor pertanian di Indonesia, khususnya dalam subsektor tanaman pangan, memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Namun, petani sering menghadapi kendala dalam akses terhadap pupuk bersubsidi, yang sangat penting untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, penyusunan E-RDKK yang efektif dan efisien diperlukan untuk memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan petani dan penyuluh pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data antara aplikasi SIMLUHTAN dan E-RDKK dapat mempercepat proses pengajuan permohonan pupuk bersubsidi. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, seperti keterlambatan pengumpulan data dan kurangnya pemahaman petani tentang teknologi, penggunaan google form sebagai alat pengumpul data terbukti efektif dalam mempercepat proses penyusunan RDKK. Penyusunan RDKK yang akurat sesuai dengan prinsip enam tepat (jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga) sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya upaya lebih lanjut dalam pelatihan petani dan penyuluh untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam proses penyusunan E-RDKK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dan mendukung keberlanjutan pertanian di Indonesia.

Kata kunci: penyuluhan, e-RDKK, pupuk bersubsidi, kelompok tani.

Korespondensi Email : mardawati.agr21@itbmpolman.ac.id

Digital Object Identifier : -

Diterima Redaksi : 12-05-2024 | **Selesai Revisi** : 25-05-2024 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2024

1. Pendahuluan

Salah satu produk utama Indonesia adalah pertanian. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional (Rizal and Togimin 2023). Pertanian mencakup berbagai aktivitas seperti bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan; dalam konteks ekonomi, pertanian berfungsi sebagai sumber utama bahan makanan dan juga menciptakan lapangan kerja, terutama di wilayah pedesaan. Pertanian juga melibatkan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi, serta mengelola lingkungan hidup. Sebagai negara agraris, Indonesia berusaha memprioritaskan program pembangunan pertanian. Pembangunan nasional telah sangat dibantu oleh sektor pertanian. Produk pertanian telah banyak menyerap tenaga kerja, menghasilkan devisa bagi negara, dan memberikan kecukupan pangan bagi jutaan rakyat Indonesia (Angga Dwi Permadi, et al., 2023)

Prasarana dan sarana pertanian yang memadai sangat penting untuk kemajuan pembangunan pertanian. Akses mendapatkan pupuk adalah salah satu masalah yang dihadapi petani. (Armant and Kurniawan 2022). Sampai saat ini, petani masih bergantung pada pupuk bersubsidi karena merupakan komoditi yang sangat penting untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Namun, mendapatkan pupuk bersubsidi bukan hal yang mudah bagi petani (Sihombing 2023). Untuk membantu petani dalam proses produksi, pemerintah memberikan subsidi pupuk. Untuk menyusun E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) elektronik,

petani, baik pelaku usaha maupun pelaku utama, harus berkumpul dalam kelompok tani (Harianto Sulaiman 2023).

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) harus dibuat berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak, dan petambak untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. RDKK harus dibuat berdasarkan azas 6 (enam) tepat: jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga. Untuk mendorong kelompok tani untuk menyusun RDKK, perlu dilakukan upaya yang dibimbing oleh Penyuluh, Petugas Teknis, Kepala Cabang Dinas (KCD) atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD), dan didukung oleh Kepala Desa atau Lurah setempat. Selama proses penyusunan E-RDKK, ada banyak masalah yang dihadapi oleh petani dan petugas Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) yang bekerja sebagai pendamping petani. Masalah-masalah ini muncul sampai tahap pengumpulan data di website E-RDKK Kementerian Pertanian (Firmansyah et al. 2023).

Petani masih menyusun E-RDKK secara manual, melalui kelompok tani mereka mengumpulkan KTP dan KK serta informasi yang dibutuhkan. Akibatnya, proses penyusunan E-RDKK sering tertunda sampai tahap uploading data oleh PPL. Dalam beberapa kasus, banyak petani yang tidak masuk ke dalam data E-RDKK, yang pada akhirnya akan berdampak pada petani. Satu metode yang dapat digunakan oleh petugas lapangan saat menyusun E-RDKK adalah menggunakan formulir Google. Diharapkan teknologi ini akan mempercepat pengumpulan data dari petani. TIK, atau internet secara khusus, telah menghasilkan struktur ekonomi yang lebih kreatif yang tidak terbatas pada jarak dan waktu.

Pupuk adalah campuran unsur hara organik atau anorganik yang ditambahkan ke media tanam atau tanaman untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga tanaman dapat bereproduksi dengan baik. Pemupukan dilakukan untuk menggantikan unsur hara yang hilang dan memberikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk meningkatkan produksi dan kualitas tanaman. Manfaat pemupukan dapat diukur dengan nilai efisiensi pupuk (Benito, et al., 2022). Dalam pertanian modern, penggunaan pupuk dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman. Dengan pemupukan yang tepat, tanaman dapat memperoleh semua unsur hara yang diperlukan untuk tumbuh dengan baik, mendukung keberlanjutan produksi pangan dan efisiensi pengelolaan sumber daya pertanian.

Kebijakan subsidi pupuk ini akan memberikan perlindungan kepada petani, meningkatkan produktivitas mereka, dan meningkatkan taraf ekonomi mereka. Namun, masalah pupuk selalu menjadi masalah di Indonesia, yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelola lahan atau sawahnya. Akibatnya, mereka akan dirugikan ketika pupuk langka dan mahal. Subsidi harga atau subsidi tidak langsung adalah salah satu jenis subsidi pupuk yang saat ini digunakan. Jenis subsidi ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dan didistribusikan oleh produsen ke distributor, pengecer, kelompok tani, dan petani (Ragimun, et al., 2020).

Menurut Pusat Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian (2006), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dimaksudkan untuk mengarahkan kelompok tani agar teknologi sesuai anjuran. RDKK memuat persyaratan kelompok tani untuk melaksanakan usaha tani berupa sarana produksi, yang dapat diperoleh secara swadana maupun secara kredit, serta persyaratan biaya lainnya. Petani dan kelompok mungkin tidak menyadari semua sarana produksi yang diperlukan untuk intensifikasi usaha tani mereka, seperti benih unggul, KCl, PPC/ZPT, dan sebagainya. Jadi, saat kelompok tani menyusun RDKK, mereka tidak dibiarkan menyusun sesuai dengan kemampuan mereka saja. Sebaliknya, harus diinstruksikan untuk memastikan bahwa RDKK yang diputuskan akan memastikan bahwa teknologi digunakan sesuai dengan anjuran (Kurniawan, et al., 2021).

Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) adalah untuk meningkatkan tepat sasaran penyaluran kartu tani. Sistem ini menangani penerimaan pupuk bersubsidi dari kartu tani. Agar program e-RDKK dapat disampaikan dengan benar kepada petani dan koordinator balai penyuluhan pertanian, diperlukan strategi komunikasi yang efektif. Strategi ini mencakup perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan. Strategi berfungsi sebagai garis besar yang akan membantu Anda mencapai tujuan (Sadana, et al., 2024). Petani akan menerima Kartu Tani setelah terdaftar dalam e-RDKK, yang digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Kartu ini tidak dapat diuangkan, dan hanya dapat digunakan untuk menebus pupuk di kios resmi. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran kepada petani, sehingga mereka dapat memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta mendukung ketahanan pangan nasional.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan Petani yang ada di Desa Rea Kecamatan Binuang. Metode pelaksanaan mencakup beberapa langkah berikut:

2.1 Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan

Surat permohonan untuk magang, pembekalan magang oleh kampus, dan penyerahan tema magang

2. Koordinasi

Berkoordinasi dengan Kepala BPP Tonyaman.

3. Pelaksanaan Magang

Mengikuti semua prosedur dan mengawasi aktivitas kelompok tani; kemudian, berbicara dengan penyuluh pertanian dan menemukan masalah bersama.

4. Identifikasi Masalah

Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi petani, konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing dan ketua kelompok tani.

5. Dokumentasi

Melakukan dokumentasi sebagai pendukung laporan kegiatan magang.

2.2 Kemampuan untuk Memahami Integrasi Data

Memahami integrasi data variabel SIMLUHTAN dan E-RDCK dalam meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi.

2.3 Penyusunan RDCK

Menyusun RDCK Pupuk Bersubsidi berdasarkan kebutuhan kelompok tani.

2.4 Penginputan Data

Menginput data usulan pupuk bersubsidi sesuai aplikasi E-RDCK.

2.5 Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap pemahaman petani dan penyuluh dalam penginputan data dan penyusunan RDCK.

2.6 Waktu dan Lokasi

Program ini dilaksanakan di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja karena lokasi tersebut merupakan wilayah tanggung jawab saya bekerja di kantor BPP Toyaman di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 40 hari dimulai pada tanggal 30 oktober hingga 10 Desember 2024.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pemahaman Data Variabel SIMLUB-TAN dan E-RDCK Kelompok Tani Di BPP Kecamatan Binuang

Untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di wilayah WKBPP Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sangat penting untuk memahami cara mengintegrasikan data variabel SIMLUB-TAN dan E-RDCK pada kelompok tani di BPP Kecamatan Binuang. Oleh karena itu, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDCK) untuk Pupuk Bersubsidi harus dibuat berdasarkan kebutuhan petani dan pekebun secara kelompok. Tujuan dari RDCK ini adalah untuk membantu petani dan pekebun merencanakan kebutuhan pupuk mereka dengan pengadaan pupuk bersubsidi yang memenuhi enam prinsip tepat: jumlah, jenis, waktu, lokasi, mutu, dan harga.

Tujuan penyusunan E-RDCK Pupuk Bersubsidi adalah untuk membantu petani, pekebun, dan peternak dalam merencanakan pengadaan serta penyediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip enam tepat (jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga). RDCK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk kelompok tani selama satu tahun, yang kemudian akan direkap secara bertahap mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Rekapitulasi ini akan menjadi dasar untuk mengusulkan

kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tingkat nasional pada tahun berikutnya. Selain itu, RDKK ini berfungsi sebagai alat untuk memesan pupuk subsidi kepada penyalur atau pengecer resmi. Hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani yang dapat menerima fasilitas pupuk bersubsidi. Mereka hanya dapat menerima fasilitas ini untuk petani dengan luas lahan hingga dua hektar. Ada kebutuhan untuk mengintegrasikan variabel-variabel ini dengan SIMLUHTAN dan E-RDKK. Integrasi data adalah proses menggabungkan data base dari berbagai sumber ke dalam satu data, di mana data SIMLUHTAN dan ERDK.K ada dalam bal ini. Dalam aplikasi SIMLUHTAN, saya telah menyiapkan menu untuk melakukan verifikasi database E-RDK.K pupuk bersubsidi. Ini memungkinkan admin atau petugas data di Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi.

3.2 Pemahaman Mengenai Prosedur Penyusunan RDKK untuk Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Aplikasi E-RDKK

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi adalah langkah penting untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan efisien. RDKK dibuat berdasarkan kebutuhan Poktan dan Petani di WKBPP Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. RDKK ini merupakan dokumen yang menyusun perencanaan kebutuhan pupuk untuk kelompok tani (Poktan) yang berlaku selama satu tahun. Penyusunan RDKK bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan pupuk bagi petani, pekebun, dan peternak dapat tercapai sesuai dengan Prinsip enam tepat adalah tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga.

Aplikasi E-RDKK adalah sistem digital yang digunakan untuk menyusun dan mengelola data kebutuhan pupuk bersubsidi secara lebih akurat dan efisien. Sistem ini memungkinkan proses penyusunan RDKK dilakukan secara elektronik, yang mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan distribusi informasi mengenai kebutuhan pupuk. Melalui aplikasi E-RDKK, data dari tingkat desa dapat diakses dan direkapitulasi secara bertahap, mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Hal ini mempercepat proses penyusunan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun berikutnya.

Salah satu keunggulan penggunaan aplikasi E-RDKK adalah integrasinya dengan sistem informasi lainnya, seperti SIMLUHTAN, yang dapat mengakses data terkait jenis tanaman yang dibudidayakan dan luas lahan. Hal ini memastikan bahwa setiap petani dalam kelompok tani mendapatkan jumlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan dan luas lahan mereka, yang menghindari kesalahan dalam perencanaan kebutuhan pupuk.

Penyusunan RDKK yang tepat tidak hanya mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk yang berkelanjutan. Selain itu, aplikasi E-RDKK juga memungkinkan para petani dan peternak merencanakan pengadaan pupuk sesuai dengan ketepatan waktu dan kebutuhan, sehingga mengurangi ketidaktepatan dalam penyediaan pupuk.

Dengan demikian, pemahaman terhadap penyusunan RDKK pupuk bersubsidi yang terintegrasi dengan aplikasi E-RDKK menjadi hal yang sangat penting. Penggunaan teknologi dalam proses ini akan membawa manfaat signifikan bagi efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, dan pada gilirannya akan mendukung keberhasilan program pertanian dan ketahanan pangan di tingkat nasional.

3.3 Memahami Cara Mengisi Data Usulan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Aplikasi E-RDKK

Pada kegiatan sosialisasi, aplikasi E-RDKK Poktan/Petani dan Gaoktan di WKBPP Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah mempelajari prosedur input data usulan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIMLUHTAN dan aplikasi E-RDKK. Sangat penting untuk mengisi data usulan pupuk bersubsidi melalui aplikasi E-RDKK untuk memastikan bahwa kebutuhan pupuk kelompok tani dicatat dengan akurat dan dapat dipenuhi secara efektif. Dengan sistem ini, distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih transparan dan tepat sasaran, dan ini membantu kemajuan pertanian lokal.

3.4. Gambar



Gambar 1 Sosialisasi



Gambar 2 Pengimputan e-RDCK

3. Simpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk Pupuk Bersubsidi untuk Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi, khususnya aplikasi E-RDCK, sangat penting dalam meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi. Proses penyusunan RDKK yang dilakukan secara elektronik memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan efisien, serta memastikan bahwa kebutuhan pupuk dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip enam tepat.

Dari hasil kegiatan ini, terlihat bahwa petani dan petugas penyuluh pertanian telah memahami prosedur untuk mengisi data proposal pupuk bersubsidi. Hal ini berpotensi mengurangi kesalahan dalam perencanaan dan distribusi pupuk, serta mendukung keberhasilan program pertanian dan ketahanan pangan di tingkat nasional. Dengan demikian, penerapan teknologi dalam penyusunan RDKK merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

4. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu pelaksanaan dan penyusunan jurnal Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITBM POLMAN. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Alwi, S.Pd., M.M., selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama KKN. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Rahmatia, SP, dan semua PPL di BPP Tonyaman Kecamatan Binuang yang telah menyambut kami dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok KKN yang telah bekerja sama dengan baik dan kepada dukungan moral dari keluarga selama KKN. Kami berharap hasil jurnal ini akan bermanfaat bagi semua orang dan membantu kemajuan masyarakat Desa Rea Kecamatan Binuang. Tuhan Yang Maha Esa

5. Daftar Rujukan

- [1] Angga Dwi Permadi, Durratul Hikmah Fatus Solikhah, and Muhammad Yasin. 2023. "Strategi Industrialisasi Hubungan Dengan Sektor Pertanian Di Wilayah Sidoarjo." *Student Research Journal* 1(3): 54–63. doi:10.55606/srjyappi.v1i3.314.
- [2] Armant, Dendi, and Badrudin Kurniawan. 2022. "Efektivitas Program Petani Mandiri (Ppm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Petani Di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro." *Publika*: 1539–52. doi:10.26740/publika.v11n1.p1539-1552.
- [3] Beno, J; Silen, A.P; Yanti, M. 2022. "Efisiensi Pupuk Organik Dengan Menggunakan Pupuk Organik Granul (POG) Pada Pertumbuhan dan Produksi *Oryza sativa L.* Galur Mukti Padi (GMP) 04 33(1): 1–12.
- [4] Firmansyah, Fauzan, Program Studi, Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, and Universitas Nurul Jadid. 2023. "Regulasi Produk: Upaya, Inovasi Pemerintah Dalam Meminimalisir Kelangkaan Pupuk Dalam Prespektif Islam Di Kabupaten Probolinggo." *Sibatik Journal* 2(7): 2035–48.
- [5] Harianto Sulaiman, Ak Thony AGOES. 2023. "Analisis Penerapan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Muara Enim." *Jimanggis* 4(1): 11–18.
- [6] Kurniawan, S Widarti, and F Aini. 2021. "JPKMM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen Volume 1 , Nomor 1 , Tahun 2021 ISSN (Online) : ISSN (Cetak) : " *Pengabdian kepada masyarakat manajemen* 1.
- [7] Penyaluran, Strategi, Pupuk Bersubsidi, and D I Indonesia. 2020. "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 10(1): 69–89. doi:10.35968/m-pu.v10i1.369.
- [8] Rizal, and Togimin. 2023. "Pendampingan Penyusunan E-RDCK Menggunakan Teknologi Google Form Pada Gapoktan 'Rejo Mulyo' Desa Rejoagung, Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso." *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia* 2(3): 16–29. doi:10.56444/perigel.v2i3.878.
- [9] Sadana, Elva, Fifi Hasmawati, and Muhammad Randicha Hamandia. 2024. "Strategi Komunikasi Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Pecah Pinggan Kecamatan Sungai Are Terhadap Para Penyuluh Pertanian Dalam Program RDCK." (3): 1–12.
- [10] Sihombing, Yennita. 2023. "Inovasi Kelembagaan Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan." *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences* 5: 83–90. doi:10.30595/pspfs.v5i.707.